



Rapimprov Serentak Dorong UMKM Naik Kelas

Gala Dinner HUT ke-58 Kadin Indonesia,
Anindya Bakrie Tegaskan Perkuat Sinergi
Pengusaha Daerah dan Pemerintah

DPR RI Setujui Revisi UU Kadin Jadi RUU
Inisiatif Parlemen

Ketua Umum Kadin Buka Ajang ISF 2026,
Dorong Percepatan Transisi Energi di Tengah
Investasi 2,3 Triliun Dolar AS

James T. Riady: Transformasi Kesehatan
Mendongkrak Daya Saing Indonesia

MENDORONG UMKM NAIK KELAS

Anindya Novyan Bakrie



Kemajuan ekonomi Indonesia harus terlihat dalam kemajuan usaha masyarakatnya. Ketika pedagang mampu memperluas pasar, produsen kecil dapat meningkatkan kapasitas, dan perusahaan daerah mulai memasok industri nasional, pertumbuhan ekonomi memperoleh landasan yang lebih kuat. Dari kegiatan usaha itulah pendapatan keluarga meningkat, pekerjaan tercipta, dan kesejahteraan menyebar ke berbagai wilayah.

Karena itu, saya meyakini bahwa mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas merupakan agenda utama untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Target pertumbuhan ekonomi 8% perlu kita perjuangkan dengan memperbesar kemampuan produktif masyarakat. Hilirisasi, ketahanan pangan, dan ketahanan energi akan memberikan manfaat lebih luas apabila melibatkan pengusaha kecil dalam rantai pasoknya.

Dalam berbagai pembahasan, jumlah UMKM Indonesia kerap disebut sekitar 65 juta unit. Sebagai rujukan, publikasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2025 menyebut lebih dari 64 juta UMKM, mencakup sekitar 99% unit usaha, menyerap hampir 97% tenaga kerja, dan menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto (PDB). Besarnya peran tersebut menempatkan kemajuan UMKM sebagai persoalan yang menentukan arah ekonomi nasional.

Namun, jumlah usaha yang besar harus disertai peningkatan kemampuan menghasilkan nilai tambah. Kita ingin pelaku UMKM memperoleh pendapatan yang lebih baik dari setiap jam kerja, mampu membayar pekerja secara layak, dan memiliki keuntungan untuk mengembangkan usahanya. Di sinilah produktivitas menjadi ukuran penting.

UMKM naik kelas berarti usaha semakin tertata, mutu produk semakin konsisten, pasar bertambah luas, dan keuangan semakin sehat. Sebagian usaha mikro dapat berkembang menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi menengah, dan usaha menengah menjadi perusahaan besar. Sebagian lainnya dapat tetap berukuran kecil, tetapi memiliki produktivitas tinggi dan menjadi pemasok yang diandalkan. Keduanya perlu mendapat ruang untuk tumbuh.

Peningkatan produktivitas tersebut berkaitan langsung dengan upaya keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap. Indonesia membutuhkan kenaikan pendapatan masyarakat yang berkelanjutan. Status sebagai anggota G20 dan besarnya ukuran ekonomi perlu diterjemahkan menjadi pekerjaan yang lebih produktif serta kesempatan usaha yang lebih luas.

Bank Dunia dalam World Development Report 2024: The Middle-Income Trap menekankan pentingnya menggabungkan investasi, penyerapan teknologi dan praktik bisnis yang lebih maju, serta inovasi. Pelajaran ini relevan bagi Indonesia. Tambahan modal perlu berjalan bersama peningkatan kemampuan mengelola usaha dan menggunakan teknologi agar benar-benar menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.

Kita juga perlu memahami bahwa keberhasilan menuju negara maju tidak ditentukan oleh satu angka pendapatan yang berlaku selamanya. Klasifikasi pendapatan Bank Dunia menggunakan pendapatan nasional bruto per kapita dengan metode Atlas, dan ambang batasnya diperbarui setiap tahun. Karena itu, perhatian kita harus tertuju pada kemampuan ekonomi meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Bagi UMKM, perubahan tersebut membutuhkan akses yang saling terhubung. Modal akan lebih produktif ketika tersedia pasar. Pesanan akan lebih mudah dipenuhi ketika teknologi dan keterampilan memadai. Perusahaan akan lebih berani berkembang ketika kebijakan memberikan kepastian.

Akses pertama adalah pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Pelaku usaha mikro membutuhkan pembiayaan yang mudah dijangkau, dengan proses yang dapat dipahami. Usaha yang mulai berkembang memerlukan modal kerja dan pembiayaan investasi dengan jangka waktu sesuai siklus bisnisnya. Perusahaan yang telah memperoleh pesanan membutuhkan dukungan untuk membeli bahan baku dan membayar pekerja sebelum tagihan kepada pembeli dilunasi.

Karena itu, penilaian pembiayaan perlu semakin mampu membaca arus kas, rekam transaksi, dan kualitas kontrak usaha. Pendekatan ini tetap harus menjaga prinsip kehati-hatian. Pada saat yang sama, pendampingan diperlukan agar pelaku usaha mampu memisahkan uang keluarga dari uang perusahaan, menyusun pencatatan sederhana, dan memahami kemampuan membayar kewajiban.

Kredit juga perlu dilengkapi dengan pilihan pembiayaan lain sesuai tahap perkembangan usaha, seperti kemitraan modal, pembiayaan peralatan, dan pembiayaan berbasis tagihan. Keberhasilan pendanaan harus terlihat pada usaha yang berkembang dan kemampuan membayar yang sehat.

Akses kedua adalah pemasaran. Banyak pelaku usaha memiliki produk yang baik, tetapi belum mengetahui pembeli yang tepat, standar yang dibutuhkan, atau cara memenuhi pesanan dalam jumlah besar. Kegiatan pameran dan promosi perlu diikuti pendampingan sampai terjadi transaksi dan pembelian berulang.

Pasar domestik harus menjadi tempat UMKM memperkuat kemampuan. Perusahaan besar, jaringan ritel, hotel, rumah sakit, dan berbagai lembaga dapat membuka kesempatan bagi pemasok lokal yang memenuhi standar. Kemitraan akan lebih bermanfaat apabila disertai penjelasan spesifikasi, jadwal pembelian, serta pembayaran yang tepat waktu. Keterlambatan pembayaran dapat mengganggu modal kerja usaha kecil, sekalipun penjualannya meningkat.

Dalam konteks ini, semangat "Buy from Indonesia" perlu diterjemahkan menjadi kesempatan nyata bagi UMKM. Pengusaha kecil dapat mengeksport langsung atau menjadi pemasok perusahaan yang melayani pasar internasional. Untuk masuk ke jaringan tersebut, mereka memerlukan bantuan dalam sertifikasi, pengemasan, ketertelusuran bahan baku, dan pemenuhan standar pembeli.

Semangat “Buy Indonesia” dapat melengkapinya melalui investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ketika sebuah usaha memperoleh permintaan yang lebih besar, kebutuhan mesin, gudang, atau modal kerja dapat menjadi peluang kemitraan. Hubungan antara pasar dan investasi harus dibangun berdasarkan kelayakan usaha serta pembagian risiko yang jelas.

Akses ketiga adalah teknologi. Digitalisasi perlu membantu pelaku usaha mengelola persediaan, menghitung biaya, menerima pembayaran, dan memahami pelanggan. Kehadiran di platform digital akan lebih bermanfaat apabila diikuti kemampuan mengelola usaha secara lebih efisien.

Kecerdasan buatan juga membuka kemungkinan untuk membantu penyusunan materi pemasaran, layanan pelanggan, dan analisis penjualan. Pemanfaatannya harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan pelaku usaha, disertai pemahaman mengenai keamanan data dan pemeriksaan hasilnya. Teknologi akan berguna ketika menghemat biaya, memperbaiki mutu, atau meningkatkan penjualan.

Di sektor produksi, kebutuhan teknologi dapat berupa mesin pengering, alat pengemasan, fasilitas pembekuan, atau perangkat pengujian mutu. Karena biaya investasi sering sulit ditanggung sendiri, fasilitas bersama melalui koperasi, kelompok usaha, atau kemitraan industri layak dikembangkan. Pengelolaannya harus profesional, dengan biaya layanan dan tanggung jawab perawatan yang jelas.

Akses terhadap teknologi perlu berjalan bersama peningkatan keterampilan. Pelaku usaha membutuhkan kemampuan menghitung harga pokok, menentukan harga jual, mengelola pekerja, dan membaca kontrak. Pekerja memerlukan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Kadin, asosiasi, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan vokasi dapat mempertemukan kebutuhan tersebut.

Pendampingan harus menjangkau pekerjaan sehari-hari. Ukurannya adalah apakah pencatatan membaik, produk cacat berkurang, pengiriman lebih tepat waktu, dan keuntungan meningkat. Pelaku usaha juga memerlukan akses terhadap informasi pasar, bantuan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang terjangkau.

Semua upaya tersebut membutuhkan dukungan regulasi. Perizinan dan sertifikasi harus memiliki prosedur yang jelas, biaya yang transparan, serta waktu pelayanan yang dapat diperkirakan. Standar mutu, keamanan pangan, dan perlindungan konsumen tetap harus dijaga. Pemerintah dapat membantu usaha kecil memenuhi standar melalui pendampingan dan layanan pengujian yang mudah diakses.

Kebijakan juga harus memberi dorongan bagi perusahaan untuk tumbuh. Ketika skala usaha meningkat, perubahan kewajiban administrasi perlu dapat dipersiapkan. Pelaku usaha akan lebih bersedia masuk ke sektor formal apabila melihat manfaat nyata berupa kepastian berusaha, akses pembiayaan, dan peluang pasar yang lebih luas. Dalam konteks ini, Kadin mengharapkan agar RUU Kadin Indonesia yang kini sedang dibahas DPR RI harus memberikan tempat dan peranan yang besar kepada UMKM.

Persaingan yang sehat sama pentingnya. UMKM membutuhkan kesempatan untuk menawarkan produk, memperoleh pembayaran yang wajar, dan mengembangkan usaha tanpa terhalang praktik yang menyalahgunakan kekuatan pasar. Perusahaan besar memiliki peran penting dalam membangun pemasok melalui alih pengetahuan, pendampingan mutu, serta kontrak yang memberikan kepastian.

Saya melihat program pemerintah sebagai salah satu peluang untuk memperkuat hubungan tersebut. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, berpotensi menciptakan permintaan bagi petani, peternak, nelayan, pengolah pangan, dan penyedia jasa distribusi. Permintaan yang terencana dapat menjadi dasar pengembangan usaha pangan di daerah.

Agar manfaat itu terwujud, pengadaan perlu transparan, pembayaran harus tepat waktu, dan pemasok lokal harus memperoleh kesempatan yang wajar. Keamanan pangan serta kesesuaian kapasitas pemasok menjadi syarat utama. Penggabungan pasokan dan pengembangan fasilitas penyimpanan dapat membantu usaha kecil memenuhi kebutuhan secara konsisten.

Kualitas kesehatan masyarakat juga mendukung produktivitas. Program kesehatan yang efektif dapat membantu mendeteksi penyakit lebih dini dan mengurangi gangguan terhadap kegiatan kerja. Manfaat tersebut memerlukan tindak lanjut layanan yang baik, sehingga pemeriksaan benar-benar terhubung dengan penanganan.

Pengalaman menghadapi krisis 1997–1998 mengingatkan kita pada pentingnya usaha kecil dalam menjaga kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak perusahaan besar menghadapi tekanan berat, termasuk kelompok usaha keluarga kami. Pada masa sulit itu, kegiatan usaha masyarakat tetap menjadi salah satu penopang penghidupan. Pengalaman tersebut memperkuat keyakinan saya bahwa ketahanan ekonomi nasional harus dibangun dari basis usaha yang luas.

Kini, tantangannya berkembang. Pelaku UMKM menghadapi perubahan teknologi, cuaca, dan ketidakpastian perdagangan. Mereka membutuhkan informasi dan kemampuan beradaptasi. Infrastruktur jalan, listrik, internet, serta layanan logistik yang terjangkau akan menentukan apakah produk daerah dapat bersaing dan sampai kepada pembeli.

Di sinilah Kadin harus memberikan manfaat yang nyata. Kadin provinsi serta kabupaten dan kota berada paling dekat dengan pelaku usaha. Mereka dapat mengenali pemasok yang siap berkembang, kebutuhan pendampingan, dan hambatan yang perlu disampaikan kepada pemerintah. Kadin pusat menghubungkan kebutuhan tersebut dengan jaringan pembeli, lembaga pembiayaan, investor, serta mitra teknologi.

Masukan kebijakan harus berangkat dari pengalaman lapangan. Kita perlu mengetahui izin apa yang tertahan, biaya apa yang terlalu membebani, dan peluang usaha apa yang hilang akibat hambatan tersebut. Dengan bukti yang jelas, advokasi dapat diarahkan pada penyelesaian.

Semangat ini pula yang perlu mendasari usulan penguatan kedudukan, kewenangan, dan kemandirian Kadin dalam perubahan undang-undang. Kadin ingin menjadi mitra strategis pemerintah yang mampu memberikan masukan sejak kebijakan dirancang, memperkuat layanan kepada dunia usaha, dan menjaga tata kelola organisasi yang mandiri. Pembentukan undang-undang tetap menjadi kewenangan DPR bersama pemerintah.

Ukuran keberhasilan penguatan Kadin adalah kemajuan anggotanya. Berapa usaha yang memperoleh pembeli baru? Berapa pemasok yang berhasil memenuhi standar? Apakah pembiayaan meningkatkan kapasitas produksi? Apakah produktivitas dan pendapatan pekerja membaik? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu menjadi dasar evaluasi bersama.

Target pertumbuhan ekonomi 8% menuntut kerja yang lebih terarah dan konsisten. Kemajuan UMKM merupakan salah satu kunci untuk memperluas sumber pertumbuhan, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi risiko terjebak pada tingkat kesejahteraan yang sama.

Indonesia akan memiliki jalan yang lebih kuat menuju negara maju ketika jutaan pelaku usahanya memperoleh kesempatan untuk berkembang. Karena itu, membuka akses pendanaan, pasar, teknologi, dan keterampilan bagi UMKM harus menjadi pekerjaan bersama pemerintah, dunia usaha, serta lembaga pendidikan. Ketika UMKM semakin produktif dan pekerjanya semakin sejahtera, kemajuan ekonomi Indonesia akan memiliki dasar yang lebih luas dan lebih tahan menghadapi perubahan.

DAFTAR ISI

HUT ke-58 Kadin Indonesia, Anindya Bakrie Buka Rapimprov Serentak Dorong UMKM Naik Kelas	9
Gala Dinner HUT ke-58 Kadin Indonesia, Anindya Bakrie Tegaskan Perkuat Sinergi Pengusaha Daerah dan Pemerintah	12
DPR RI Setujui Revisi UU Kadin Jadi RUU Inisiatif Parlemen	15
Ketua Umum Kadin Buka Ajang ISF 2026, Dorong Percepatan Transisi Energi di Tengah Investasi 2,3 Triliun Dolar AS	17
Presiden Prabowo Subianto Lantik Bamsoet Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia	20
Kadin Indonesia dan Enterprise Greece Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi, Bidik Transaksi 1 Miliar Dolar AS pada 2030	23
Kadin Indonesia-Rusia Teken MoU, Dorong Perdagangan Produk Pertanian	25
Kadin Dorong Penguatan Sektor Kesehatan untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi dan Kerja Sama Internasional	27
James T. Riady: Transformasi Kesehatan Mendongkrak Daya Saing Indonesia	29
Kadin-Bappenas Bentuk Task Force KPBU untuk Percepat Pembangunan Nasional	32
Ketum Kadin: Ketahanan Ekonomi dan Gotong Royong Jadi Kunci Hadapi Tantangan New Normal Economy	35
Kadin-Lemhannas Perkuat Nilai Kebangsaan, Dorong Dunia Usaha Jadi Pilar Ketahanan Ekonomi	38

DAFTAR ISI

Andi Ilham Terpilih jadi Ketum Kadin Gorontalo Periode 2026-2031

40

Anindya Bakrie Lantik Pengurus Kadin Sulteng Periode 2026-2031, Ungkap Potensi Ekonomi Sulteng Tak Hanya Nikel

41

Kadin Indonesia Konsolidasikan Pembentukan Kadin Papua Selatan Devinitif

43

HEADLINE

HUT ke-58 Kadin Indonesia, Anindya Bakrie Buka Rapimprov Serentak Dorong UMKM Naik Kelas



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan sambutan dalam Pembukaan Rapimprov Serentak dan Tasyakuran HUT Ke-58 Kadin Indonesia, Kamis (24/9/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia resmi membuka penyelenggaraan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Serentak Kadin Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Kadin Indonesia pada 24 September 2026.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan Rapimprov Serentak yang digelar di 38 provinsi menjadi forum untuk menyerap aspirasi dan masukan dari dunia usaha di daerah yang selanjutnya akan dibawa ke tingkat nasional.

Menurut Anin sapaan akrabnya, salah satu fokus utama Rapimprov adalah mendorong UMKM agar dapat naik kelas dan menjadi eksportir yang andal. Hal tersebut dinilai penting seiring upaya memperkuat organisasi dan meningkatkan kontribusi dunia usaha terhadap perekonomian nasional.

“Tapi yang paling penting tadi di sini kita juga mengedepankan bagaimana UMKM ini bisa naik kelas, menjadi tentunya pengeksportir yang handal ke depannya. Karena kalau organisasinya kuat tentu hasilnya baik,” kata Anin.

Anin mengatakan penyelenggaraan Rapimprov juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama antara dunia usaha dan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.

“Kita sadar bahwa sekarang pemerintah ini sedang bekerja keras melihat banyaknya tantangan ekonomi dalam negeri dan luar negeri untuk peningkatan lapangan kerja dan tentunya juga memastikan bahwa kita terus kompetitif dan kita keluar dari middle income trap,” ujar Anin.



Pembukaan Rapimprov serentak di seluruh Provinsi di Indonesia dilaksanakan secara luring dan daring, pada Kamis (24/9/2026).



(Kiri ke Kanan) Dewan Kehormatan Kadin Indonesia Adi Putra Tahir, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Dewan Kehormatan Kadin Indonesia Aburizal Bakrie, serta Dewan Kehormatan Kadin Indonesia Suryo B. Sulisto saat menghadiri acara Pembukaan Rapimprov Serentak Tahun 2026 dan Tasyakuran HUT Ke-58 Kadin Indonesia, pada 24 September 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta.

Lebih lanjut, Anin menjelaskan Rapimprov dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi bersama gubernur masing-masing. Berbagai masukan dari daerah tersebut nantinya akan disaring dan dibawa ke Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin yang dijadwalkan berlangsung pada 29-31 Oktober 2026.

"Nah, ini menandakan bahwa apa pun yang kita akan sajikan di Rapimnas bulan depan adalah hasil dari Rapimprov hari ini yang tentunya akan memberikan masukan, inspirasi, aspirasi yang sangat berguna," kata Anin.

Anin menambahkan hasil Rapimprov di 38 provinsi akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah, termasuk dalam memastikan kebijakan dan regulasi dapat sejalan dengan kebutuhan dunia usaha.

Anin menuturkan terdapat sejumlah fokus yang menjadi perhatian Kadin, di antaranya ketahanan energi, ketahanan pangan, peningkatan kapasitas UMKM, diplomasi ekonomi untuk mendorong ekspor, serta penciptaan lapangan kerja dan iklim usaha yang kondusif.

"Ketahanan energi itu dikedepankan, ketahanan pangan itu juga sangat dikedepankan, lalu bagaimana UMKM bisa naik kelas, itu juga menjadi satu fokus utama. Dan bagaimana diplomasi ekonomi itu menghasilkan ekspor yang lebih baik, itu juga beberapa fokus kita semua," katanya.

Lebih lanjut, Anin mengatakan upaya tersebut sejalan dengan konsep Indonesia Incorporated yang menekankan gotong royong antara dunia usaha, pemerintah, dan akademisi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Anin, semangat tersebut juga sejalan dengan ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, hasil pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya dirasakan kelompok yang telah mapan, tetapi juga dapat mendorong UMKM, pelaku usaha daerah, dan korporasi untuk naik kelas.

"Karena itu ekonomi kerakyatan juga memang mesti hadir dan juga mesti dikembangkan. Karena ini justru bisa meningkatkan competitiveness Indonesia, apalagi dalam keadaan middle class atau kelas menengah yang sedikit ada penurunan," kata Anin.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan terdapat empat fokus yang perlu menjadi perhatian dalam Rapimprov 2026. Pertama, memperkuat peran Kadin Provinsi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, memperkuat pertumbuhan pengusaha daerah, termasuk UMKM, agar dapat naik kelas.

Ketiga, membantu menyelesaikan persoalan dunia usaha lintas sektor melalui penguatan koordinasi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Keempat, memperkuat tata kelola organisasi Kadin Provinsi serta Kadin Kabupaten/Kota dan menjalankan ketentuan organisasi secara konsisten.

"Kekuatan Kadin Indonesia berangkat dari Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten Kota yang aktif, solid, dan dekat dengan kebutuhan dunia usaha. Saya berharap Rapimprov Kadin tahun 2026 berjalan lancar, konstruktif, dan menghasilkan keputusan yang benar-benar dapat ditindaklanjuti di daerah masing-masing," ujar Arsjad.

Rangkaian peringatan HUT ke-58 Kadin Indonesia tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak yatim secara simbolis, doa bersama anak yatim, serta pemotongan tumpeng.

Hadir dalam acara tersebut jajaran anggota Dewan Kehormatan Kadin Indonesia di antaranya Aburizal Bakrie, Adi Putra Tahir, Suryo Bambang Sulistyio serta anggota Dewan Usaha Kadin Indonesia Putri Wardhani.

Turut hadir jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, WKUK Bidang Luar Negeri James T. Riady, WKUK Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Carmelita Hartoto, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Azis Syamsuddin dan WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Juan Permata Adoe.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie saat sesi potong tumpeng acara Tasyakuran HUT Ke-58 Kadin Indonesia pada 24 September 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta.

Gala Dinner HUT ke-58 Kadin Indonesia, Anindya Bakrie Tegaskan Perkuat Sinergi Pengusaha Daerah dan Pemerintah

PJakarta – Gala Dinner Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta pada Kamis (08/10/2026) malam yang dipersembahkan oleh Wakil Ketua Umum (WKU) Wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku dan Maluku Utara Amirullah Abbas menjadi ajang penguatan komitmen dunia usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa kekuatan utama Kadin terletak pada akar rumput pengusaha di daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

Kehadiran para pimpinan lembaga negara, diplomat, pejabat kementerian, serta pimpinan Kadin Provinsi semakin memperkuat posisi Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dan Bank Indonesia dalam menggerakkan ekosistem bisnis Tanah Air.

“Kami ingin berkontribusi lebih. Karena memang di dalam ekonomi kita bahwa dari 100% PDB yang (berasal dari) belanja pemerintah hanya 8 persen. Sisanya adalah di luar belanja pemerintah. Artinya ada hubungan dengan dunia usaha, serta konsumsi domestik,” ujar Anin sapaan akrabnya.

Dikatakan Anin, memasuki usia ke-58 tahun sejak berdiri pada tahun 1968, Kadin Indonesia terus berupaya menjawab tantangan era modern melalui penyesuaian regulasi.

Anin menyampaikan pentingnya revisi terhadap Undang-Undang Kadin yang telah berusia 39 tahun agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, digitalisasi, rantai pasok global, serta ekonomi hijau.

“Langkah revisi yang telah disahkan sebagai inisiatif DPR RI ini bertujuan memperkuat kedudukan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah sebelum regulasi diterbitkan, menjaga kemandirian organisasi, serta memperbesar kontribusi dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju target delapan persen,” tutur Anin.

Revisi regulasi tersebut juga dirancang agar Kadin Indonesia menjadi wadah inklusif yang menempatkan pelaku UMKM sebagai pilar utama. Dari sekitar 65 juta korporasi di Indonesia, sebanyak 97 persen merupakan UMKM yang rentan terdampak oleh disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan. Dengan mendorong UMKM di daerah naik kelas serta meningkatkan pendapatan per kapita nasional, Indonesia diyakini mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah dalam kurun waktu dua dekade mendatang. Kadin Indonesia siap memanfaatkan jaringan luasnya dari tingkat daerah hingga asosiasi untuk memberikan masukan nyata dari lapangan kepada pemerintah.



Wakil Ketua Umum (WKU) Wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku dan Maluku Utara Kadin Indonesia, Amirullah Abbas yang juga merupakan Ketua Pelaksana Gala Dinner HUT Ke-58 Kadin Indonesia saat menyampaikan sambutannya, pada Kamis (8/10/2026).



Ketua Penyelenggara Gala Dinner HUT ke-58 Kadin Indonesia sekaligus WKU Koordinator (WKUK) Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menyampaikan sambutannya, pada Kamis (8/10/2026).

Menurut Anin, guna mendukung capaian target ekonomi tersebut, Kadin Indonesia menghadirkan sejumlah lembaga dan satuan tugas strategis seperti Kadin Indonesia Institute, Kadin Global Engagement Office, Kadin Indonesia Trading House, serta Training Center.

Kadin Indonesia juga memperkuat diplomasi ekonomi internasional dan merencanakan peluncuran buku *We Buy From Indonesia* yang mengulas keterlibatan 80 merek global dalam menggunakan komponen produk asal Indonesia. Anin juga mengapresiasi dukungan dari seluruh pengurus Kadin daerah, asosiasi, dan pimpinan terdahulu yang terus menjaga soliditas serta semangat kebersamaan demi kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan. Sementara itu, Ketua Penyelenggara Gala Dinner HUT ke-58 Kadin Indonesia sekaligus WKU Koordinator (WKUK) Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan bahwa keberadaan Kadin Indonesia hingga saat ini tidak terlepas dari kerja bersama, semangat kolaborasi, serta kontribusi Kadin daerah, asosiasi, Anggota Luar Biasa (ALB), seluruh pelaku usaha, donatur, dan mitra strategis yang hadir bersama kita malam ini. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan Kadin Indonesia.

"Terima kasih secara khusus kepada seluruh mitra strategis. Dukungan Bapak dan Ibu bukan sekadar kontribusi terhadap penyelenggaraan sebuah acara, melainkan juga bentuk kepercayaan kepada Kadin Indonesia," kata Erwin.

Memasuki usia ke-58 tahun, lanjut Erwin, Kadin Indonesia tidak ingin menjadikan perayaan tersebut sekadar momentum seremonial. Sebaliknya, ini harus menjadi titik untuk menatap dan mempersiapkan langkah ke depan.

"Kita ingin Kadin semakin kuat sebagai rumah bagi dunia usaha, semakin dekat dengan pelaku usaha di daerah, serta semakin mampu menjadi jembatan antara dunia usaha dan agenda pemerintah nasional, ujar Erwin.

WKU Wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku dan Maluku Utara Kadin Indonesia sekaligus Ketua Pelaksana Gala Dinner HUT ke-58 Kadin Indonesia Amirullah Abbas dalam sambutannya mengatakan bahwa Gala Dinner sekaligus perayaan HUT ke-58 Kadin Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan mendorong kemajuan dunia usaha.

"Semoga para pengusaha ke depannya bisa lebih maju lagi. Sebagai pengusaha, harapan sederhana kita adalah agar hari ini menjadi lebih baik dari hari sebelumnya, dan hari-hari yang akan datang bisa semakin maju. Itulah harapan sederhana kita," kata Amirullah.

Lebih lanjut dalam sambutannya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan bahwa DPD RI dan Kadin Indonesia memiliki irisan peran yang sangat strategis dalam ekosistem ekonomi nasional.



Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin memberikan sambutan dalam acara Gala Dinner HUT ke-58 Kadin Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026).



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie memberikan sambutan dalam acara Gala Dinner HUT ke-58 Kadin Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026).

"DPD RI bertugas membawa suara dan aspirasi daerah ke tingkat kebijakan nasional, sedangkan Kadin Indonesia menggerakkan energi serta memetakan kebutuhan dunia usaha di daerah," Kata Sultan.



Selain dihadiri Jajaran Dewan Pengurus Kadin, Gala Dinner HUT Ke 58 Kadin Indonesia juga dihadiri pejabat pemerintahan dan para duta besar negara sahabat, di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Kolaborasi kedua pihak menjadi sangat relevan agar pembangunan nasional tidak berhenti sekadar pada angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan mampu menghadirkan lapangan kerja, memberikan nilai tambah, menguatkan investasi, mendorong UMKM naik kelas, serta memajukan industri daerah

Hadir dalam acara tersebut WKUK Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya, WKUK Bidang Sosial Kadin Indonesia Nita Yudi, WKUK Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar, WKUK Bidang Koperasi dan UMKM Kadin Indonesia Nurdin Halid, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin dan WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe.

Juga hadir jajaran Ketua Umum Kadin Provinsi di seluruh Indonesia.



Gala Dinner HUT Ke 58 Kadin Indonesia dihadiri para tamu undangan diantaranya jajaran dewan pengurus Kadin, pejabat pemerintahan, duta besar negara sahabat, asosiasi bisnis, hingga pimpinan media massa.



Jajaran Dewan Pengurus Kadin Indonesia saat sesi potong kue dan tumpeng dalam Gala Dinner HUT Ke 58 Kadin Indonesia, di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

DPR RI Setujui Revisi UU Kadin Jadi RUU Inisiatif Parlemen



Jajaran dewan pengurus Kadin Indonesia berfoto bersama jajaran Komisi VI DPR-RI usai rapat paripurna terkait persetujuan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menjadi RUU usul inisiatif DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal tersebut digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, (22/9/2026). Keputusan ini diambil secara aklamasi setelah pimpinan sidang meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dengan kehadiran sebanyak 195 anggota dewan.

Proses penyiapan RUU Kadin ini telah berproses sejak awal September 2026 melalui Komisi VI DPR RI. Pada Rabu, 2 September 2026, Komisi VI DPR mengundang pengurus Kadin Indonesia beserta pengurus tingkat provinsi untuk menyerap aspirasi dalam pembuatan naskah akademik dan RUU. Langkah tersebut kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama para akademikus guna mempertajam substansi rancangan aturan.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, Badan Legislasi DPR RI juga telah menyelesaikan tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU Kadin pada Senin, 21 September 2026 malam.



(Dari kiri) Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Azis Syamsuddin, WKUK Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya, beserta jajaran pengurus Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi menghadiri Rapat paripurna DPR RI terkait persetujuan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menjadi RUU usul inisiatif DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).



Rapat paripurna DPR RI terkait persetujuan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menjadi RUU usul inisiatif DPR yang dihadiri oleh Jajaran Pengurus Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Ketua Panitia Kerja Penyusun RUU Kadin Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa pembaruan regulasi ini sangat mendesak agar Kadin mampu merespons tantangan ekonomi masa depan. Kadin dituntut memiliki kapasitas yang lebih relevan menghadapi perkembangan globalisasi, digitalisasi, kecerdasan buatan, serta integrasi pasar internasional dalam rantai pasok global. Penyesuaian regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat peran sekaligus meningkatkan daya saing dunia usaha nasional di tingkat global.

Arah perubahan regulasi ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil. Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan bahwa Kadin harus hadir secara konkret untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu menembus pasar internasional. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menekankan agar UMKM tidak sekadar menjadi jago kandang, melainkan sanggup bersaing di pasar global dengan memanfaatkan penyesuaian regulasi berbasis digitalisasi.

Selain itu, pembaruan kelembagaan Kadin diarahkan untuk memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah di sektor perdagangan, ekonomi, dan industri.

Menanggapi keputusan parlemen tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyatakan kesiapannya untuk mengikuti seluruh proses pembahasan RUU.



Ketua Umum kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie didampingi oleh jajaran pengurus Kadin saat memberikan keterangan pers usai Rapat paripurna DPR RI terkait persetujuan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menjadi RUU usul inisiatif DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Anindya atau Anin sapaan akrabnya menjelaskan bahwa masukan yang diberikan Kadin bertujuan mendorong penguatan ekosistem UMKM dan koperasi. Mengingat ekosistem UMKM mencakup 92 persen dari total dunia usaha, perhatian khusus dibutuhkan agar sektor ini dapat naik kelas. Kadin berharap memperoleh kekhususan kewenangan agar lebih efektif membantu dunia usaha di daerah, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan nilai investasi dan perdagangan nasional dengan tetap menjaga prinsip independensi nonbujeter.

Ketua Umum Kadin Buka Ajang ISF 2026, Dorong Percepatan Transisi Energi di Tengah Investasi 2,3 Triliun Dolar AS



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie memberikan sambutan dalam acara pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada 6 Oktober 2026.

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai ketahanan energi kembali menjadi salah satu agenda utama dunia di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Kondisi tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Hal tersebut disampaikan Anindya atau Anin sapaan akrabnya saat pembukaan ajang Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 yang mengusung tema “Investing for a Resilient, Sustainable, and Prosperous World” di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada 6-7 Oktober 2026.

Anin mengatakan konflik yang terjadi di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa pasar energi global masih rentan terhadap gangguan geopolitik. Dampaknya terlihat dari kenaikan harga minyak yang pada 2026 bergerak dari sekitar 65 dolar AS menjadi 110 dolar AS per barel.

Kondisi tersebut, lanjut Anin, semakin penting bagi Indonesia karena konsumsi bahan bakar nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Dengan demikian, terdapat kesenjangan sekitar 1 juta barel per hari yang masih harus dipenuhi.

“Indonesia melihat hal ini sebagai persoalan serius. Ketergantungan inilah yang membuat kita rentan ketika harga global bergerak,” kata Anin.

Menurut Anin, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat ketahanan energi dengan mempercepat elektrifikasi, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Anin mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa penguatan kemandirian energi harus menjadi bagian penting dari respons Indonesia menghadapi ketidakpastian global.

Dalam konteks tersebut, Kadin memandang konsep Indonesia Incorporated, yang mendorong pemerintah dan dunia usaha bekerja bersama, menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia.

“Di Kadin, kami meyakini bahwa arah Presiden mengenai Indonesia Incorporated, di mana pemerintah dan dunia usaha bekerja bersama, merupakan langkah yang tepat,” ujar Anin.

Di sisi lain, Anin melihat investasi global dalam transisi energi terus meningkat meskipun dunia menghadapi ketegangan geopolitik. Investasi transisi energi global pada 2025 tercatat mencapai rekor 2,3 triliun dolar AS. Belanja global untuk transportasi berbasis elektrifikasi juga mencapai hampir 900 miliar dolar AS pada 2025, meningkat dari 741 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya.

Anin turut mengapresiasi pemerintah, khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, atas peningkatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Dalam satu tahun terakhir, tingkat penjualan kendaraan listrik di Indonesia disebut hampir meningkat dua kali lipat.

Menurut Anin, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi Indonesia.

“Hal ini menciptakan urgensi sekaligus peluang,” kata Anin.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie memberikan paparannya mengenai ketahanan energi dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada 6 Oktober 2026.



Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim, Energi Hashim S. Djojohadikusumo yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia menyampaikan sambutan dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada 6 Oktober 2026.

"Keempat, mendorong pengembangan ekonomi sirkular dan pemanfaatan energi, serta kelima, memperkuat praktik kehutanan berkelanjutan," terang Anin

Lebih lanjut, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim, Energi Hashim S. Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa secara geografis, demografis, dan situasi geopolitik, Indonesia berada dalam posisi yang strategis sehingga menarik perhatian para investor.

Ia juga mengatakan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI terus menerima minat dari investor berbagai negara untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Indonesia selalu mencari teman. Presiden kami selalu mengatakan seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Prinsip inilah yang menjadi landasan utama politik luar negeri kita," kata Hashim.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Rosan Roeslani menilai transisi energi membuka peluang investasi baru pada hilirisasi dan infrastruktur digital Indonesia seiring meningkatnya kebutuhan listrik ekonomi digital dan energi bersih bagi industri.

Anin menambahkan, Kadin sebelumnya telah memperkirakan potensi ekonomi Indonesia dari agenda net zero mencapai 3,8 triliun dolar AS hingga 2050. Untuk merealisasikan potensi tersebut, diperlukan peran aktif sektor swasta dalam pengembangan iklim, pembiayaan, pasar karbon, serta peningkatan keterampilan.

Menutup paparannya, Anin menyampaikan lima prioritas Kadin dalam mendorong aksi iklim dan pertumbuhan berkelanjutan. Pertama, mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan Indonesia dalam mencapai target net zero.



(Dari kanan) Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Rosan Roeslani dan Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Keberlanjutan Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani di sela-sela acara pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada 6 Oktober 2026.

“Salah satu peluang terpenting di hadapan kita adalah persinggungan antara transisi energi dan ekonomi digital,” kata Rosan.

Menurut Rosan, perkembangan kecerdasan buatan (AI) meningkatkan kebutuhan listrik, sementara pusat data semakin menjadi bagian dari infrastruktur strategis.

“Masa depan AI akan bergantung pada listrik, jaringan transmisi, lahan industri, konektivitas, dan investasi. Dengan kata lain, masa depan AI juga tentang infrastruktur,” ujarnya.

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Keberlanjutan Kadin Indonesia menilai bahwa keberlanjutan semakin menjadi bagian integral dari strategi pertumbuhan dan daya saing dunia usaha.

“Sustainability semakin menjadi bagian dari bagaimana dunia usaha melihat pertumbuhan, daya saing, dan peluang di masa depan. Bagi perusahaan, transisi ini membuka ruang untuk berinovasi, menciptakan nilai, dan membangun daya saing jangka panjang. ISF 2026 mempertemukan dunia usaha, investor, pemerintah, dan berbagai mitra strategis untuk melihat peluang tersebut dan mendorong kolaborasi yang dapat mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan resilient,” kata Shinta.

Sementara itu, Ketua Pelaksana ISF 2026 Rachmat Kaimuddin mengatakan, di tengah dinamika global, Indonesia terus melihat peluang untuk memperkuat agenda pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya tahan.

“Di tengah perubahan arah dan dinamika global, menjaga konsistensi agenda keberlanjutan menjadi semakin penting. Bagi Indonesia, tantangannya adalah bagaimana menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mendorong transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.

Rachmat menilai bahwa, pertumbuhan hijau perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, membuka peluang baru, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat. “Berangkat dari kepentingan nasional justru dapat membuat agenda keberlanjutan lebih relevan, berkelanjutan, dan membuka ruang kolaborasi global,” katanya.

Turut hadir jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya WKUK Bidang Perekonomian Franky O. Widjaja, WKUK Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan Hidup Bobby Gafur Umar, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Aziz Syamsuddin dan WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Juan Permata Adoe.



(Dari kiri) Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar, Ketua Umum Kadin Indonesia anindya Novyan Bakrie, Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Rosan Roeslani, WKUK Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Keberlanjutan Kadin Indonesia, WKUK Bidang Perekonomian Kadin Indonesia Franky O. Widjaja, serta Direktur Danantara Development Management Fund saat memberikan keterangan pers di sela-sela acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada 6 Oktober 2026.

Presiden Prabowo Subianto Lantik Bamsoet Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia



Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo saat dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/26). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Bamsoet masuk dalam jajaran Wantimpres bersama 25 tokoh nasional dari berbagai latar belakang, dengan Pratikno sebagai Ketua dan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua. Pengangkatan tersebut menempatkan Bamsoet dalam posisi strategis untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dengan membawa pengalaman panjang di lembaga legislatif, pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan politik.

“Saya memandang amanah sebagai Anggota Wantimpres sebagai kelanjutan dari pengabdian di lembaga yang berbeda. Selama hampir 20 tahun berada di parlemen, saya belajar bahwa setiap kebijakan negara membutuhkan pertimbangan yang matang, melihat persoalan dari berbagai sudut, sekaligus mendengar suara masyarakat. Pengalaman tersebut akan saya bawa dalam menjalankan amanah sebagai Wantimpres,” ujar Bamsoet usai dilantik sebagai anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/26).

Penunjukan Bamsoet berkaitan erat dengan rekam jejaknya sebagai tokoh parlemen. Bamsoet pernah menduduki sejumlah posisi strategis, mulai dari Ketua Komisi III DPR RI bidang hukum, HAM dan keamanan pada 2016–2018, Ketua DPR RI ke-20 pada 2018–2019, hingga Ketua MPR RI periode 2019–2024. Ia pertama kali terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII pada Pemilu 2009 dan terus memperoleh kepercayaan sebagai wakil rakyat dalam pemilu-pemilu berikutnya. Rekam jejak panjang tersebut membuat Bamsoet memiliki pengalaman langsung dalam proses legislasi, pengawasan, penganggaran, serta dinamika hubungan antarlembaga negara.



Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo berdiskusi dengan para anggota Dewan Pertimbangan Presiden di sela-sela acara pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).



Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

"Saya melihat pengalaman sebagai Ketua DPR dan Ketua MPR memberikan perspektif yang cukup lengkap mengenai bagaimana kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi kebijakan publik, bagaimana aspirasi masyarakat masuk ke dalam proses politik, dan bagaimana lembaga negara harus membangun komunikasi agar keputusan yang diambil dapat berjalan efektif. Karena itu, saya akan berusaha memberikan pertimbangan yang objektif, berbasis data dan kepentingan nasional," kata Bamsoet.

Di lingkungan Partai Golkar, perjalanan politik Bamsoet juga berlangsung panjang. Ia pernah dipercaya menjadi Bendahara Umum Partai Golkar pada masa kepemimpinan Aburizal Bakrie. Setelah itu, Bamsoet menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto dan kemudian kembali dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Pengalaman tersebut mempertemukan Bamsoet dengan berbagai dinamika internal partai, proses pengambilan keputusan politik, kaderisasi, serta hubungan partai dengan masyarakat dan lembaga negara.

"Pengalaman di Partai Golkar mengajarkan saya bahwa politik pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Saya pernah berada di berbagai posisi dalam partai dengan kepemimpinan yang berbeda. Dari sana saya memahami pentingnya menjaga komunikasi, menghormati perbedaan pandangan, dan mencari titik temu ketika kepentingan politik berhadapan dengan kepentingan kebangsaan," tutur Bamsoet.

Dengan pelantikan tersebut, Bamsoet menjadi satu-satunya anggota DPR RI yang masih aktif yang masuk dalam jajaran Wantimpres baru. Komposisi Wantimpres 2026 sendiri memperlihatkan keberagaman latar belakang, mulai dari tokoh agama, akademisi, purnawirawan TNI dan Polri, pengusaha, mantan pejabat negara, hingga tokoh politik dan profesional. Di dalamnya terdapat antara lain Pratikno, Hatta Rajasa, Quraish Shihab, Agum Gumelar, Budi Gunawan, Chairul Tanjung, Said Aqil Siradj, Yahya Cholil Staquf, Jusuf Wanandi, Jusuf Hamka, Tahir, Anwar Usman, Ignasius Jonan dan sejumlah tokoh lainnya.

"Keberagaman latar belakang anggota Wantimpres justru menjadi kekuatan. Ada pengalaman pemerintahan, parlemen, militer, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, hingga masyarakat sipil. Tantangannya adalah bagaimana seluruh pengalaman itu dapat diramu menjadi masukan yang konstruktif bagi Presiden. Wantimpres harus mampu memberikan pandangan yang jernih, termasuk ketika sebuah kebijakan membutuhkan koreksi atau penyempurnaan," tegas Bamsoet.

Perjalanan Bamsoet di parlemen juga telah mendapatkan pengakuan negara. Pada 14 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Bamsoet atas jasa dan sumbangsihnya selama menjalankan tugas sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024. Sekretariat Negara mencatat Bintang Mahaputera Adipradana diberikan kepada Bamsoet berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105/TK/TH 2024 dan 108/TK/TH 2024.

"Bintang Mahaputera Adipradana merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab. Saya menerimanya sebagai penghargaan negara terhadap kerja kelembagaan yang dilakukan bersama seluruh pimpinan dan anggota MPR RI. Karena itu, penghargaan tersebut saya dedikasikan kepada keluarga besar MPR dan seluruh pihak yang selama ini bekerja bersama dalam menjalankan amanah konstitusi," ujar Bamsoet.

Sebelumnya, pada tahun 2020, Bamsoet juga menerima Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo. Sekretariat Negara mencatat Bambang Soesatyo sebagai salah satu penerima Bintang Jasa Utama dalam rangkaian penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan 2020, dengan dasar Keputusan Presiden Nomor 52/TK/Tahun 2020. Penghargaan tersebut diberikan berkaitan dengan pengabdianannya sebagai Ketua DPR RI periode 2018-2019.

Selain kedua tanda kehormatan tersebut, Bamsoet juga pernah menerima sejumlah penghargaan dan brevet kehormatan, antara lain Dharma Pertahanan Utama dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto 2023, Brevet Baret Ungu Korps Marinir sebagai Warga Kehormatan TNI AL, Brevet Wing Penerbang Kelas I Pesawat Tempur sebagai Warga Kehormatan TNI AU, Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam sebagai Warga Kehormatan TNI AL, serta brevet Warga Kehormatan Brimob Polri dan brevet Warga Kehormatan Badan Intelijen Negara (BIN). Bamsoet juga pernah menerima penghargaan Dharma Pertahanan Utama yang diserahkan langsung oleh Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Rekam penghargaan tersebut melengkapi perjalanan pengabdian Bamsoet yang selama ini banyak bersinggungan dengan isu pertahanan, keamanan, hukum dan ketatanegaraan.

"Berbagai penghargaan dan tanda kehormatan yang pernah saya terima tidak boleh dilihat sebagai tujuan akhir. Justru setiap penghargaan harus menjadi pengingat bahwa semakin besar kepercayaan yang diberikan negara, semakin besar pula tanggung jawab untuk memberikan manfaat. Sekarang amanah itu bertambah melalui Wantimpres, sehingga saya harus bekerja lebih sungguh-sungguh dan menjaga kepercayaan Presiden serta masyarakat," kata Bamsoet.

Dengan latar belakang panjang di parlemen, pengalaman dalam Partai Golkar, serta keterlibatan dalam berbagai isu hukum, politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi, Bamsoet membawa pengalaman politik praktis sekaligus pengalaman kelembagaan ke dalam Wantimpres. Lembaga tersebut memiliki posisi strategis karena memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sesuai bidang yang ditugaskan. Bamsoet mengatakan pengalaman sebagai Ketua DPR dan Ketua MPR akan menjadi bekal untuk memahami konsekuensi kebijakan dari perspektif parlemen dan masyarakat.

"Saya ingin menjalankan tugas ini dengan tetap berpijak pada kepentingan nasional. Masukan kepada Presiden harus berangkat dari data, konstitusi, kepentingan masyarakat dan kemampuan negara dalam melaksanakannya. Kalau ada kebijakan yang sudah tepat, tentu harus diperkuat. Kalau ada yang masih memiliki ruang perbaikan, harus disampaikan secara terbuka dan konstruktif. Prinsipnya, Wantimpres harus menjadi bagian dari proses memperkuat kualitas pemerintahan dan pembangunan nasional," pungkas Bamsoet.



Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo (dua dari kiri) yang juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI berfoto bersama jajaran Wantimpres di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

LUAR NEGERI

Kadin Indonesia dan Enterprise Greece Perkuat Kerja Sama Perdagangan dan Investasi, Bidik Transaksi 1 Miliar Dolar AS pada 2030



Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kedutaan Besar Yunani di Jakarta menggelar Indonesia-Greece Business Forum bertajuk “Building a New Trade and Investment Corridor Between Greece and Indonesia” di Menara Kadin Indonesia, Rabu (14/10/2026).

Dalam forum tersebut, Kadin Indonesia dan Hellenic Trade and Investment Promotion Agency S.A. (Enterprise Greece) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang penguatan kerja sama perdagangan, investasi, dan bisnis antara Indonesia dan Yunani.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, kerja sama dengan Yunani menjadi bagian dari upaya Kadin bersama pemerintah untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra, termasuk di kawasan Eropa. Upaya tersebut juga sejalan dengan proses penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEUCEPA).

“Kadin ini bekerja keras bersama pemerintah untuk meningkatkan perdagangan,” ujar Anin sapaan akrabnya.

Anin menyampaikan, nilai perdagangan Indonesia dan Yunani saat ini baru sekitar 300 juta dolar AS. Menurut Anin, potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui peningkatan perdagangan produk unggulan Indonesia sekaligus pengembangan produk bernilai tambah. Produk unggulan yang dapat ditingkatkan pemasarannya antara lain tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, furnitur, dan kopi. Selain itu, kedua negara memiliki peluang untuk memperluas kerja sama di sektor maritim, termasuk perkapalan dan logistik.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie bersama Chairman of the Hellenic ASEAN Business Council (HABC) Nick Stasinopoulos usai menandatangani nota kesepahaman tentang penguatan kerja sama perdagangan, investasi, dan bisnis antara Indonesia dan Yunani, di Menara Kadin Indonesia, Jakarta (14/10/2026).

“Dua-duanya (Indonesia-Yunani) negara maritim, jadi bisa belajar bagaimana mengolah ini semua. Dari perkapalan, logistik, Yunani terkenal mendunia, apalagi ada di dalam dua lautan, samudra seperti kita,” kata Anin.

Anin menilai, kesamaan karakter sebagai negara maritim membuka peluang bagi Indonesia dan Yunani untuk memperkuat investasi, industrialisasi, serta perdagangan. Kedua negara pun menargetkan peningkatan nilai perdagangan hingga 1 miliar dolar AS pada 2030.

Untuk mencapai target tersebut, Kadin Indonesia akan terus memperkuat promosi produk nasional ke pasar internasional, salah satunya melalui program We Buy From Indonesia. Program ini bertujuan memperkenalkan produk Indonesia kepada pembeli global, termasuk merek-merek besar dunia yang telah menjalin kerja sama dengan pemasok dari Indonesia. “Kita mau meningkatkan jumlah yang membeli dan persentase komponennya lebih banyak lagi, sehingga ujung-ujungnya semua medium enterprises kita bisa maju, atau UMKM kita,” ujar Anin.

Sementara itu, Chairman of the Hellenic ASEAN Business Council (HABC) Nick Stasinopoulos mengatakan, penandatanganan MoU tersebut merupakan kelanjutan dari hubungan dan kerja sama yang telah terjalin antara komunitas bisnis kedua negara.



Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia, Bernardino Vega (dua dari kiri) dan Chairman of the Hellenic ASEAN Business Council (HABC) Nick Stasinopoulos (tiga dari kiri) berfoto bersama jajaran delegasi Yunani, dewan pengurus Kadin dan Komite Bilateral Kadin, (14/10/2026).

“Penandatanganan hari ini dibangun di atas hubungan yang telah berkembang selama ini. Kerja sama kami dengan Kadin didukung oleh komitmen bersama untuk mendekatkan komunitas bisnis kedua negara,” ujar Nick.

Menurutnya, kerja sama antara Kadin Indonesia dan Enterprise Greece dapat berperan penting dalam membantu pelaku usaha membangun koneksi bisnis yang tepat, meningkatkan kepercayaan diri saat memasuki pasar yang belum dikenal, serta membuka jalan yang lebih jelas menuju berbagai peluang usaha baru.

“Di sinilah kerja sama antara Kadin dan Enterprise Greece dapat memberikan dampak nyata, dengan membantu perusahaan membangun koneksi yang tepat, meningkatkan kepercayaan diri di pasar yang belum dikenal, dan menemukan jalan yang lebih jelas menuju peluang-peluang baru,” kata Nick.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega.

Kadin Indonesia-Rusia Teken MoU, Dorong Perdagangan Produk Pertanian



Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pertanian Kadin Indonesia sekaligus Chairwoman Indonesia Eurasia International Council, Devi Erna Rachmawati dengan perwakilan dari Russian Export Center dan Ryazan Chamber of Commerce and Industry dalam forum Days of International Business 2026 di Ryazan, Rusia, Kamis (24/09/2026).

Ryazan, Rusia – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pertanian memperkuat peluang kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Rusia melalui keikutsertaan dalam forum Days of International Business 2026 di Ryazan, Rusia, Kamis (24/09/2026).

Forum tersebut mempertemukan pelaku usaha, eksportir, investor, serta pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk membahas peluang perdagangan, investasi, pengembangan industri, teknologi, serta kemitraan bisnis jangka panjang.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kadin Indonesia sekaligus Chairwoman Indonesia Eurasia International Council Devi Erna Rachmawati, hadir sebagai pembicara dalam Country Session South Asia bertajuk "Market Focus for Russian Exporters: South Asian Market Requirements and Cooperation Potential."

Sesi tersebut menjadi ruang untuk membahas kebutuhan pasar, peluang ekspor, serta potensi kolaborasi antara perusahaan Rusia dan mitra bisnis di kawasan Asia Selatan dan Asia, khususnya di sektor pertanian.

Dalam kesempatan tersebut, Devi juga turut memperkuat kerja sama bisnis Indonesia–Rusia melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Russian Export Center dan Ryazan Chamber of Commerce and Industry. Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan perdagangan, khususnya ekspor dan impor produk pertanian antara Indonesia dan Rusia.

Kehadiran perwakilan Indonesia dalam forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi bisnis dan membangun hubungan ekonomi yang lebih erat antara kedua negara. Pertemuan dan sesi kerja sama internasional dalam forum tersebut turut menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi Indonesia sebagai pasar sekaligus mitra strategis bagi perusahaan-perusahaan Rusia.

Berbagai pembahasan dalam forum mencakup peluang perdagangan, ekspor-impor, investasi, pengembangan industri, teknologi, serta kerja sama bisnis jangka panjang.



Sesi diskusi forum Days of International Business 2026 di Ryazan, Rusia, Kamis (24/09/2026).

Partisipasi Indonesia juga membuka ruang komunikasi langsung dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan internasional untuk mendorong terbentuknya kerja sama yang lebih konkret, termasuk business matching, strategic partnership, joint venture, serta peluang investasi dan perdagangan, khususnya di sektor pertanian. "Kerja sama internasional bukan hanya tentang membuka pasar, tetapi juga membangun kepercayaan, mempertemukan kebutuhan, dan menciptakan nilai bersama bagi kedua negara," kata Devi.

Dengan potensi pasar yang besar, sumber daya yang beragam, serta posisi geografis yang strategis, Indonesia memiliki peluang untuk terus memperluas kerja sama ekonomi dengan Rusia dan negara-negara lainnya.

Keikutsertaan dalam Days of International Business 2026 menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas bisnis global sekaligus memperkuat posisi pelaku usaha Indonesia dalam ekosistem perdagangan internasional.

Melalui penguatan komunikasi dan kerja sama antar-pelaku usaha, hubungan Indonesia-Rusia diharapkan dapat berkembang dari penajakan peluang menuju kemitraan bisnis yang lebih konkret, khususnya dalam perdagangan dan sektor pertanian.

BERITA PROGRAM

Kadin Dorong Penguatan Sektor Kesehatan untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi dan Kerja Sama Internasional

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai sektor kesehatan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat kerja sama internasional. Hal tersebut disampaikan Anin sapaan akrabnya dalam Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast bertajuk “Building National Health Systems, Growing Regional Resilience to Scale Global Impact” di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta Selatan, Jumat (09/10/2026).

Anin mengatakan, sektor kesehatan berkontribusi sekitar 60 miliar dolar AS terhadap perekonomian Indonesia setiap tahun. Menurut Anin, dampak sektor tersebut terhadap perekonomian juga besar karena memiliki efek berganda yang dapat mendorong aktivitas ekonomi di berbagai bidang.

“Ketika kita berbicara tentang kesehatan, ini adalah sektor yang kami yakini dapat membantu Indonesia meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5 persen menjadi 6 persen, 7 persen, hingga 8 persen,” ujar Anin.

Anin juga menyoroti pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada 2025 yang telah menjangkau 70 juta masyarakat Indonesia. Kadin, lanjutnya, turut mendukung program tersebut sebagai salah satu langkah cepat organisasi dalam membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Anin menilai penguatan sistem kesehatan nasional perlu berjalan seiring dengan peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan industri kesehatan.

“Karena itu, Kadin terus membangun kemitraan dengan pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan, untuk memperkuat ekosistem industri kesehatan Indonesia,” ujar Anin.

Ke depan, lanjut Anin, Indonesia juga dijadwalkan menjadi tuan rumah WHO World Local Production Forum ke-4 di Bali pada 2027. Anin berharap momentum tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan produksi lokal di sektor kesehatan serta memperluas kerja sama dengan komunitas internasional.

“Kami ingin menjadikan sektor kesehatan sebagai pilar yang lebih kuat dalam kemitraan dengan Indonesia,” kata Anin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady mengatakan sektor kesehatan tidak hanya berkaitan dengan persoalan sosial, tetapi juga berhubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, ketahanan ekonomi, investasi, dan teknologi.

Menurut James, berbagai perkembangan penting di sektor kesehatan saat ini melibatkan kerja sama lintas negara, mulai dari industri farmasi, teknologi medis, kecerdasan buatan (AI), penelitian, pelatihan, hingga rantai pasok dan pertukaran pengetahuan.

“Karena itu, pertemuan pagi ini pada dasarnya bertujuan menghubungkan transformasi kesehatan Indonesia dengan komunitas internasional,” kata James



Jajaran Pengurus Kadin Indonesia dan tamu undangan berfoto bersama usai acara Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta Selatan, Jumat (9/10/2026).



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memberikan sambutan di acara Kadin Monthly Economic Diplomacy Breakfast di Aula Leimena, Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Di tengah tantangan global berupa kebutuhan penciptaan lapangan kerja, tekanan sosial ekonomi, dan polarisasi, James menilai kepemimpinan yang mampu menghubungkan berbagai kepentingan menjadi semakin penting. Tantangan kesehatan pun membutuhkan kemampuan membangun kerja sama melampaui batas negara dan sektor.

Atas dasar itu, James menyampaikan dukungannya terhadap pencalonan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). James berharap pengalaman Indonesia dapat berkontribusi terhadap perbaikan kesehatan global. Karena itu, ia menginginkan pembahasan yang mencakup tantangan dunia, termasuk bagaimana pelayanan kesehatan dapat dibiayai secara berkelanjutan, dikelola dengan baik, dan dijangkau lebih banyak orang.

"Kami ingin mendengar bukan hanya tentang Indonesia, tetapi juga situasi kesehatan global dan apa yang dapat dilakukan," terang James.

Lebih Lanjut, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa menyoroti peluang besar pertumbuhan ekonomi di sektor kesehatan domestik. Sesuai arahan Presiden, Kadin diminta mengawal pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) serta pembukaan lapangan kerja di sektor ini.

"Sektor kesehatan ini sangat promising, bisa tumbuh di atas 8 persen, begitu juga dengan penyerapan tenaga kerjanya. Potensi pasar industri dan investasinya sangat besar," jelas Menkes Budi.

Terkait dinamika keanggotaan negara-negara besar seperti Amerika Serikat di lembaga dunia, Menkes Budi menegaskan pentingnya kolaborasi inklusif global.

Belajar dari pengalaman pandemi COVID-19, tidak ada satu negara pun yang bisa selamat sendirian di tengah dunia yang saling terhubung.

"Kita ini satu keluarga dengan 8 miliar orang di planet Bumi. Tidak enak kalau ada anggota keluarga yang keluar. Pendekatan kita adalah merangkul semua negara untuk kembali bersama-sama membenahi sistem kesehatan dunia," ujar Menkes Budi.

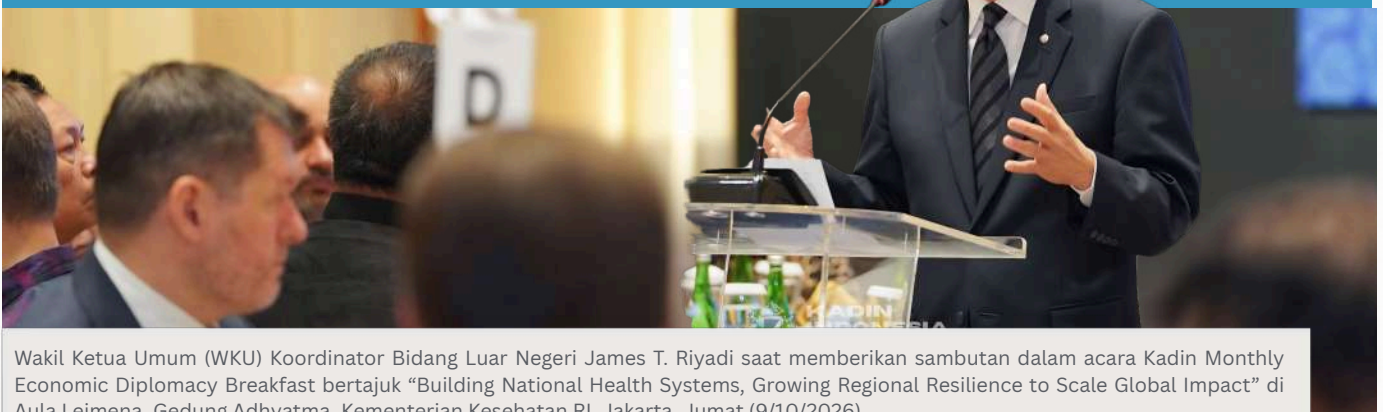
Hadir dalam acara tersebut WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin, WKU Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega dan WKU Bidang Pemasaran, Promosi, Inovasi dan Pengembangan Produk UMKM Kadin Indonesia Rifda Ammarina.

Juga hadir jajaran Ketua Umum (Ketum) Kadin Provinsi di antaranya Ketum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat Faurani, Ketum Kadin Provinsi Jambi Usman Sulaiman, Ketum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur Bobby Lianto, dan Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Selatan Shinta Laksmi Dewi.



Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin memberikan sambutan di acara Kadin Monthly Economic Diplomacy Breakfast di Aula Leimena, Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

James T. Riady: Transformasi Kesehatan Mendongkrak Daya Saing Indonesia



Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Luar Negeri James T. Riyadi saat memberikan sambutan dalam acara Kadin Monthly Economic Diplomacy Breakfast bertajuk “Building National Health Systems, Growing Regional Resilience to Scale Global Impact” di Aula Leimena, Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Jakarta – Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Kadin Indonesia Bidang Luar Negeri James T. Riady menegaskan, transformasi kesehatan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Kesehatan menentukan kualitas manusia, produktivitas, dan ketahanan bangsa, sekaligus membuka peluang investasi serta kerja sama internasional di bidang farmasi, teknologi medis, riset, dan pembiayaan.

Karena itu, menurut James, kesehatan harus mendapatkan tempat yang semakin kuat dalam diplomasi ekonomi Indonesia. Hubungan dengan negara sahabat perlu diterjemahkan menjadi kemitraan yang memperluas akses pelayanan, meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kesehatan bukan hanya persoalan sosial. Kesehatan juga menyangkut modal manusia, produktivitas, ketahanan, investasi, teknologi, dan semakin erat kaitannya dengan kerja sama internasional,” ujar James dalam Kadin Monthly Economic Diplomacy Breakfast di Aula Leimena, Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Acara tersebut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, para duta besar, serta perwakilan dunia usaha. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, yang membacakan sambutan sekaligus menyampaikan salamnya kepada peserta.

James menjelaskan, forum diplomasi ekonomi Kadin yang digelar setiap Jumat kedua menjadi ruang untuk membangun kedekatan antara dunia usaha, pemerintah, dan komunitas diplomatik. Di tengah kesibukan masing-masing, pertemuan rutin tersebut diharapkan memperkuat rasa kebersamaan serta kesadaran bahwa berbagai persoalan dunia membutuhkan jawaban bersama.

“Kita biasanya berbicara tentang perdagangan, investasi, geopolitik, industri, dan teknologi. Namun, kesehatan sesungguhnya sangat wajar menjadi bagian dari percakapan yang sama,” katanya.

Menurut James, semakin banyak perkembangan penting dalam sektor kesehatan yang berlangsung lintas batas negara. Industri farmasi, teknologi medis, dan kecerdasan buatan berkembang melalui jaringan internasional. Hal serupa terjadi dalam penelitian, pendidikan dan pelatihan, investasi, pengelolaan rantai pasok, serta pertukaran pengetahuan dan tenaga ahli.

Kondisi tersebut membuat transformasi kesehatan Indonesia memiliki hubungan langsung dengan agenda Kadin Bidang Luar Negeri. Kemitraan internasional dapat membantu mempertemukan kebutuhan nasional dengan sumber pembiayaan, teknologi, keahlian, dan kapasitas produksi yang tersedia di berbagai negara. “Pertemuan pagi ini sesungguhnya bertujuan menghubungkan transformasi kesehatan Indonesia dengan komunitas internasional,” ujar James.



Ia menekankan, pembahasan kesehatan perlu menjangkau keseluruhan arsitektur sistemnya. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana pelayanan kesehatan dibiayai, diorganisasikan, didigitalisasi, diperluas jangkauannya, serta disampaikan secara efektif kepada masyarakat. Pemahaman mengenai aspek ekonomi kesehatan juga diperlukan untuk melihat arah perubahan dan keberlanjutan sistem tersebut.

Dalam konteks itu, James menilai Budi Gunadi Sadikin membawa perspektif yang khas. Pengalamannya di bidang teknologi, perbankan, dan badan usaha milik negara memberinya pemahaman luas mengenai pengelolaan organisasi, pembiayaan, dan hubungan antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan institusi untuk memenuhinya.

James menilai Budi sebagai sosok yang, ketika berkiprah di perbankan, berupaya memahami kebutuhan nasabah dan membantu pengembangan usaha mereka. Menurut dia, pengalaman tersebut turut membentuk cara Budi melihat persoalan kesehatan dari berbagai sisi.

Sebagai pelaku usaha yang turut membangun jaringan Rumah Sakit Siloam, James menilai pendekatan tersebut memberikan penyegaran. Ia berharap dialog dengan Menteri Kesehatan dapat menjelaskan bagaimana arsitektur dan ekonomi kesehatan Indonesia telah berubah, serta ke mana sistem tersebut akan diarahkan.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin (kanan) bersama Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Luar Negeri, James T. Riyadi pada saat memberikan sambutan dalam acara Kadin Monthly Economic Diplomacy Breakfast di Aula Leimena, Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Agenda transformasi yang disorot James mencakup pelayanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, dan pembiayaan. Seluruhnya membutuhkan keterhubungan agar perubahan dapat dirasakan masyarakat secara luas. Ia juga menggarisbawahi pentingnya kemitraan yang memiliki ukuran keberhasilan jelas, yakni dampak nyata dari kerja sama yang dijalankan.

Di tengah tantangan global berupa kebutuhan penciptaan lapangan kerja, tekanan sosial ekonomi, dan polarisasi, James menilai kepemimpinan yang mampu menghubungkan berbagai kepentingan menjadi semakin penting. Tantangan kesehatan pun membutuhkan kemampuan membangun kerja sama melampaui batas negara dan sektor.

Atas dasar itu, James menyampaikan dukungannya terhadap pencalonan Budi sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut penuturannya, Presiden telah mengajukan Budi dalam pencalonan tersebut sejak Mei. Ia juga menyampaikan kesannya bahwa Budi memperoleh penerimaan yang baik dalam berbagai pertemuan internasional yang mereka ikuti.

James berharap pengalaman Indonesia dapat berkontribusi terhadap perbaikan kesehatan global. Karena itu, ia menginginkan pembahasan yang mencakup tantangan dunia, termasuk bagaimana pelayanan kesehatan dapat dibiayai secara berkelanjutan, dikelola dengan baik, dan dijangkau lebih banyak orang. "Kami ingin mendengar bukan hanya tentang Indonesia, tetapi juga situasi kesehatan global dan apa yang dapat dilakukan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan sistem kesehatan merupakan kebutuhan ekonomi, peluang investasi, dan fondasi ketahanan nasional. Pandemi Covid-19 memperlihatkan bagaimana krisis kesehatan dapat mengganggu pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan rantai pasok, sekaligus menekan produktivitas serta kualitas modal manusia.

Ia menyoroti ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku farmasi yang, menurut paparannya, masih melampaui 90%. Ketergantungan tersebut membuat industri nasional rentan terhadap gangguan pasokan global. Untuk menguranginya, Indonesia membutuhkan investasi, transfer teknologi, penelitian bersama, dan penguatan kemampuan manufaktur domestik.

Ambisi Indonesia, menurutnya, adalah berkembang dari konsumen besar produk kesehatan menjadi pusat regional yang kompetitif dalam inovasi farmasi, produksi vaksin, dan teknologi medis.

Dalam proses tersebut, diplomasi berperan membuka kemitraan, sedangkan dunia usaha membantu mewujudkannya menjadi kapasitas industri dan pelayanan.

Ia juga memaparkan dua perhatian diplomasi kesehatan Indonesia, yakni pengaturan akses patogen dan pembagian manfaat dalam kerangka Perjanjian Pandemi WHO, serta penguatan tata kelola kesehatan global dan pembiayaan berkelanjutan. Indonesia mendorong akses yang adil terhadap vaksin, obat-obatan, dan diagnostik, disertai transfer teknologi yang bermakna.

Pembiayaan internasional, lanjutnya, perlu mendukung prioritas nasional, memperkuat kemampuan domestik, dan menghasilkan manfaat yang terukur. Kemlu beserta jaringan perwakilan Indonesia di luar negeri juga menyatakan dukungan terhadap pencalonan Budi sebagai Direktur Jenderal WHO.

Forum tersebut menempatkan Kadin dan sektor swasta sebagai mitra penting dalam menghubungkan diplomasi dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Kerja sama internasional diharapkan menghasilkan industri yang lebih kuat, pelayanan yang semakin terjangkau, dan masyarakat yang lebih produktif—fondasi bagi ekonomi Indonesia yang lebih tangguh.



Suasana acara Kadin Monthly Economic Diplomacy Breakfast yang diselenggarakan di Aula Leimena, Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Kadin-Bappenas Bentuk Task Force KPBU untuk Percepat Pembangunan Nasional

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong percepatan pembangunan nasional melalui kegiatan “Sinergi Pemerintah-Badan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Nasional” di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko mengatakan kebutuhan pembangunan Indonesia ke depan semakin besar sehingga diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan dunia usaha.

Pemerintah memiliki agenda pembangunan yang luas dan strategis, sementara dunia usaha memiliki kapasitas modal, teknologi, inovasi, jaringan, serta kemampuan eksekusi yang dapat mendukung realisasi agenda tersebut.

“Pertanyaannya adalah, bagaimana kita membangun ekosistem yang membuat keduanya dapat bergerak bersama secara lebih cepat, pasti, dan produktif. Inilah semangat yang ingin terus kami dorong melalui Kadin Indonesia,” ujar Taufan.



Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Kadin Indonesia, Bayu Priyawan Djokosoetono (dua dari kiri) dan WKU Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko (tiga dari kiri) berfoto bersama jajaran Bappenas usai kegiatan bertajuk “Sinergi Pemerintah dan Badan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Nasional” di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Menurut Taufan, kualitas dan kesiapan proyek menjadi salah satu hal penting dalam mendorong investasi. Dunia usaha membutuhkan proyek dengan kebutuhan pembangunan yang jelas, arah kebijakan yang kuat, serta kepastian regulasi, perizinan, struktur pembiayaan, risiko, dan model investasi.

“Kadin Indonesia siap menjadi jembatan antara kebutuhan pembangunan pemerintah dengan perspektif dan kemampuan dunia usaha. Kami percaya bahwa proyek yang baik bukan hanya proyek yang ready to offer, tetapi proyek yang benar-benar ready to invest, ready to execute, dan memberikan economic impact,” katanya.

Taufan mengatakan Kadin juga dapat memperkuat konektivitas antara proyek dan investor dengan mempertemukan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, investor, serta sumber pembiayaan.

“Kadin tidak hanya menjadi ruang komunikasi dunia usaha, tetapi juga dapat menjadi marketplace of opportunities yang mempertemukan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, investor, dan berbagai sumber pembiayaan,” ujar Taufan.



Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Kadin Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono saat menjadi pembicara dalam forum bertajuk "Sinergi Pemerintah-Badan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Nasional" di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Sebagai tindak lanjut, Kadin Indonesia bersama Kementerian PPN/Bappenas RI akan membentuk Task Force Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Strategis dan Inovatif. Task Force tersebut diharapkan menjadi ruang kerja bersama untuk memperkuat pengembangan proyek, skema pembiayaan, serta peluang investasi yang mendukung percepatan pembangunan nasional.

"Melalui Task Force ini, kita ingin memperkuat proses dari identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan, penyiapan proyek, pengembangan skema pembiayaan, hingga mempertemukan proyek dengan badan usaha, investor, dan sumber pembiayaan yang tepat," terang Taufan.

Lebih lanjut, WKU Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Kadin Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono mengatakan keterbatasan kemampuan pembiayaan pemerintah membuat kolaborasi dengan badan usaha menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pembangunan.

"Karena itu, kolaborasi pemerintah dan badan usaha bukan lagi pilihan tambahan, tetapi menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pembangunan," ujar Bayu.

Menurut Bayu, KPBU dan pembiayaan strategis dan inovatif perlu dikembangkan sebagai ecosystem of collaboration yang mempertemukan pemerintah, badan usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat.

"KPBU dan pembiayaan strategis inovatif harus kita dorong menjadi sebuah ecosystem of collaboration, sebuah ekosistem yang mempertemukan pemerintah sebagai pemilik mandat pembangunan, badan usaha sebagai pelaksana dan inovator, lembaga keuangan sebagai penyedia pembiayaan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan," katanya.

Bayu menilai terdapat tiga aspek yang perlu diperkuat, yakni project readiness, innovative financing, dan business government alignment. Investor, kata dia, membutuhkan proyek yang memiliki kejelasan regulasi, kelembagaan, risiko, kesiapan lahan, skema pendapatan, serta kepastian proses investasi.

"Karena itu, kualitas penyiapan proyek menjadi sangat menentukan," ujar Bayu.

Di sisi pembiayaan, Bayu mendorong pemanfaatan berbagai instrumen inovatif, termasuk skema de-risking dan blended financing, untuk mempertemukan proyek dengan sumber modal yang tepat, baik dari investor domestik maupun internasional. Sementara itu, business government alignment diperlukan agar pemerintah dan dunia usaha dapat saling memberikan masukan mengenai prioritas pembangunan, kondisi lapangan, risiko investasi, kebutuhan pasar, serta hambatan yang dihadapi investor.

Bayu menegaskan Kadin Indonesia siap memperkuat perannya sebagai penghubung antara pemerintah dan dunia usaha, termasuk melalui Satgas Kadin KPBU dan Pembiayaan Strategis Inovatif yang dibentuk bersama Direktorat Pembiayaan Inovatif Strategis. Satgas tersebut akan menjadi platform kolaborasi dan fasilitasi dunia usaha untuk memberikan masukan pasar, mendorong peningkatan bankability proyek, mempertemukan proyek dengan calon investor dan sumber pembiayaan, serta mengidentifikasi hambatan komersial dan pembiayaan.

"Project pipeline harus menjadi investment pipeline, dan investment pipeline harus menjadi pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tuturnya.

Lebih jauh Deputy Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan (PIP) Kementerian PPN/Bappenas RI Putut Hari Satyaka menegaskan, meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur perlu diikuti dengan perluasan sumber pembiayaan di luar APBN dan APBD. Kolaborasi pemerintah dan badan usaha diperlukan untuk menghadirkan proyek yang berkualitas, layak, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Keberhasilan Pembangunan Nasional bukan hanya diukur dari berapa banyak proyek yang dapat direncanakan atau ditawarkan kepada investor,

tetapi dari berapa banyak proyek yang dapat diwujudkan menjadi investasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Deputy PIP.

Dalam forum tersebut, Deputy PIP juga menekankan tiga aspek yang perlu diperkuat, yaitu kualitas perencanaan dan penyiapan proyek, penguatan ekosistem investasi, dan penguatan dialog antara pemerintah dan badan usaha.

Hadir dalam acara tersebut WKU Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari dan Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatra Barat Buchari Bachter.



Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Kadin Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono (kanan) berfoto bersama para pembicara forum diskusi bertajuk “Sinergi Pemerintah-Badan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Nasional” di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Ketum Kadin: Ketahanan Ekonomi dan Gotong Royong Jadi Kunci Hadapi Tantangan New Normal Economy



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memberikan paparan dalam sesi materi “Kadin Indonesia dan Tantangan New Normal Economy: Gotong Royong Menuju Indonesia Maju” kepada peserta Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Kolaboratif Angkatan Ke-121 Lemhannas RI Tahun 2026 di Gedung Trigatra, Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan pentingnya ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, disrupsi teknologi, serta berbagai tekanan eksternal yang memengaruhi perekonomian dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Anin sapaan akrabnya saat memaparkan sesi materi “Kadin Indonesia dan Tantangan New Normal Economy: Gotong Royong Menuju Indonesia Maju” kepada peserta Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Kolaboratif Angkatan Ke-121 Lemhannas RI Tahun 2026 bertajuk “Membangun Kemandirian Bangsa Melalui Astacita Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045” di Gedung Trigatra, Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2026).

“Ketahanan ekonomi ini adalah suatu ketahanan yang sangat penting untuk dipertahankan,” ujar Anin.

Dijelaskan Anin, ketahanan ekonomi merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperkuat melalui kontribusi dunia usaha. Anin menegaskan, Kadin memiliki mandat untuk berperan dalam perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Lebih lanjut, Kondisi geopolitik global saat ini kata Anin, menunjukkan meningkatnya ketidakpastian yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi. Ketegangan di berbagai kawasan, termasuk krisis di Selat Hormuz, memicu kenaikan harga energi dan biaya logistik yang pada akhirnya turut memengaruhi perekonomian Indonesia.

“Geopolitik hari ini bukan lagi urusan diplomat dan tentara saja. Ia sudah menjadi urusan pelaku usaha,” kata Anin.

Anin menguraikan enam tekanan eksternal yang memengaruhi perekonomian nasional, yakni gejolak geopolitik dan harga energi, disrupsi rantai pasok, perang dagang, perlambatan perdagangan dunia, persaingan investasi, serta disrupsi teknologi.

Pada sektor energi, Anin menyoroti fluktuasi harga minyak dunia yang meningkatkan ketidakpastian bagi pelaku usaha sekaligus menambah beban subsidi energi pemerintah. Sementara itu, gangguan jalur pelayaran internasional turut meningkatkan biaya pengangkutan dan asuransi, sehingga memengaruhi kelancaran perdagangan. Tekanan lainnya berasal dari perang dagang dan kebijakan proteksionisme yang berpotensi menghambat ekspor Indonesia. Di tengah perlambatan perdagangan global, lanjut Anin, persaingan untuk menarik investasi juga semakin ketat karena berbagai negara menawarkan insentif dan kepastian berusaha guna meningkatkan daya tarik investasinya.

Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan dan industri semikonduktor menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Menurut Anin, kemampuan untuk masuk ke dalam rantai nilai global berbasis teknologi akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

"Tekanan global tersebut juga tercermin dalam kondisi dunia usaha di dalam negeri. Pelemahan nilai tukar rupiah dan kontraksi aktivitas manufaktur sebagai sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi," kata Anin.

Anin juga berpesan kepada peserta PPNK Angkatan Ke-121 agar menerapkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai ketahanan nasional yang diperoleh selama program ke dalam lingkungan perusahaan masing-masing. Anin berharap nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam memperkuat perekonomian dan memajukan bangsa.

"Lemhannas mendidik saudara tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Bawa itu pulang ke perusahaan masing-masing, untuk memajukan ekonomi bangsa dan negara," ujar Anin.



Suasana diskusi pada kegiatan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Kolaboratif Angkatan Ke-121 Lemhannas RI Tahun 2026 di Gedung Trigatra, Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2026).

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan, yang turut hadir untuk memaparkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, mengatakan bahwa pemerintah berupaya memastikan arah kebijakan dan program-program Presiden dapat dipahami oleh kalangan dunia usaha, khususnya anggota Kadin.

"Dalam rangka dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kita ingin memastikan bahwa semua pikiran-pikiran Bapak Presiden dan program-programnya itu bisa dijelaskan kepada teman-teman dari Kadin," kata Syahganda.

Ia menjelaskan, diskusi bersama Kadin juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengar berbagai masukan dan keluhan pelaku usaha, termasuk mengenai kepastian ekonomi ke depan dan dampak berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi aktivitas usaha.

Sebagai Kepala Bakom RI, Syahganda mengatakan masukan tersebut akan menjadi bahan untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintahan.

Ia juga mengapresiasi peran Kadin yang dinilai memiliki jaringan pengusaha hingga ke daerah dan dapat membantu pemerintah menyampaikan informasi serta menjembatani komunikasi dengan dunia usaha.



Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah, terpilih menjadi Ketua Angkatan PPNK Kolaboratif Angkatan Ke-121 Lemhannas RI Tahun 2026.

“Beliau sendiri, Ketua Kadin sebagai pelaku usaha, menyatakan bahwa MBG yang disebut selama ini buruk, ternyata menurut pengalaman beliau sangat baik sekali dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Syahganda.

Dalam kesempatan tersebut, Syahganda turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta media mencatat pandangan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengenai dampak program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan pengalaman yang disampaikan dalam diskusi.

Agenda PPNK Kolaboratif Angkatan ke-121 Lemhannas RI ini berlangsung pada 6-12 Oktober 2026 dan diikuti oleh sebanyak 105 peserta yang sebagian besar merupakan para pelaku usaha anggota Kadin Indonesia dari berbagai daerah.



Foto bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie bersama peserta Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Kolaboratif Angkatan Ke-121 Lemhannas RI Tahun 2026 di Gedung Trigatra, Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2026).

Kadin-Lemhannas Perkuat Nilai Kebangsaan, Dorong Dunia Usaha Jadi Pilar Ketahanan Ekonomi



Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo bersama Panitia Pelaksana Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Kolaboratif Angkatan Ke-121 Lemhannas RI Tahun 2026 berdiskusi dengan Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily di Kantor Lemhannas RI, Jakarta (6/10/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menggelar Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Kolaboratif Angkatan ke-121 Lemhannas RI dengan tema “Membangun Kemandirian Bangsa Melalui Astacita Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045” di Gedung Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Selasa (06/10/2026).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan, melalui program PPNK, para pengusaha didorong untuk memahami posisi, kedudukan, hak, dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sekaligus warga negara.

“Intinya adalah bagaimana para pengusaha ini lebih memahami posisi, kedudukan dan kewajibannya serta hak-haknya sebagai pengusaha yang juga sebagai warga negara. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar kita, mulai dari pembukaan undang-undang dasar sampai pengaturan bidang ekonominya di Pasal 33,” ujarnya saat memberi materi pembekalan.

Menurutnya, salah satu persoalan yang masih dihadapi dunia usaha adalah ketidakpastian akibat perubahan regulasi. Meskipun perubahan aturan ditujukan untuk menciptakan regulasi yang lebih baik, perubahan tersebut dapat memengaruhi perencanaan usaha dan investasi.

“Mungkin saja perubahan peraturan undang-undang ini dalam rangka perubahan regulasi menuju yang lebih baik, tapi bagi dunia usaha perubahan itu justru membuat ketidakpastian dalam perencanaan sebuah usaha dan investasi,” katanya.

Bambang mengatakan, kondisi tersebut juga dapat menjadi pertimbangan bagi investor asing dalam menyusun rencana investasinya di Indonesia. Karena itu, Kadin mendorong pemerintah menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam jangka panjang.

"Inilah yang kita minta kepada pemerintah untuk membuat suatu regulasi yang berkepastian hukum jangka panjang. Ini sangat juga mengganggu pertimbangan para investor asing masuk ke kita dalam perencanaan investasinya," ujarnya.

Di sisi lain, Bambang menilai perlindungan terhadap pekerja perlu berjalan beriringan dengan perlindungan bagi pengusaha. Menurutnya, dunia usaha juga membutuhkan kepastian hukum agar tidak menjadi korban dari perubahan aturan yang terjadi setiap saat.

"Kadin juga sedang berpikir dan ingin mendorong tidak hanya pekerja yang harus kita lindungi, tapi juga pengusaha harus dilindungi dari ketidakpastian hukum yang tadi kita sempat singgung. Supaya mereka tidak jadi korban atas berbagai aturan yang berubah setiap saat," katanya.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, kolaborasi dengan Kadin Indonesia sebagai wadah dunia usaha serta berbagai lembaga lainnya menjadi wujud sinergi antara pembinaan nilai-nilai kebangsaan dan penguatan peran dunia usaha dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Menurut Ace, melalui penguatan kapasitas, pertukaran gagasan, dan pemahaman terhadap kepentingan negara, diharapkan terbentuk pelaku usaha yang memiliki integritas, nasionalisme, kepedulian terhadap kepentingan nasional, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Ace menyampaikan terdapat sejumlah hal penting yang perlu menjadi perhatian dunia usaha. Pertama, kemajuan dunia usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan penguatan ekonomi semata, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, literasi digital, integritas, dan karakter kebangsaan.

Kedua, dunia usaha perlu terus mendorong inovasi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, penguatan nilai tambah, serta pemanfaatan teknologi digital secara bertanggung jawab untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Menurut Ace, melalui penguatan kapasitas, pertukaran gagasan, dan pemahaman terhadap kepentingan negara, diharapkan terbentuk pelaku usaha yang memiliki integritas, nasionalisme, kepedulian terhadap kepentingan nasional, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan pembangunan.



Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Bambang Soesatyo saat menjadi Pembicara dalam acara Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Kolaboratif Angkatan ke-121 Lemhannas RI dengan tema "Membangun Kemandirian Bangsa Melalui Astacita Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045" di Gedung Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

Ace menyampaikan terdapat sejumlah hal penting yang perlu menjadi perhatian dunia usaha. Pertama, kemajuan dunia usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan penguatan ekonomi semata, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, literasi digital, integritas, dan karakter kebangsaan.

Kedua, dunia usaha perlu terus mendorong inovasi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, penguatan nilai tambah, serta pemanfaatan teknologi digital secara bertanggung jawab untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

"Dan terakhir, tentu yang juga sangat penting adalah membangun kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai komponen bangsa harus terus diperkuat untuk membangun ekosistem ekonomi yang tangguh, berdaya saing, berkelanjutan, serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan," ujar Ace.

Agenda PPNK Kolaboratif Angkatan ke-121 Lemhannas RI ini berlangsung pada 6-12 Oktober 2026 dan diikuti oleh sebanyak 105 peserta yang sebagian besar merupakan para pelaku usaha anggota Kadin Indonesia dari berbagai daerah.



Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Bambang Soesatyo (tiga dari kiri) berfoto bersama peserta Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Kolaboratif Angkatan ke-121 Lemhannas RI dengan tema "Membangun Kemandirian Bangsa Melalui Astacita Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045" di Gedung Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

BERITA DAERAH

Andi Ilham Terpilih jadi Ketum Kadin Gorontalo Periode 2026-2031



Pembukaan acara Musyawarah Provinsi (Muprov) V Kadin Gorontalo di Hotel Aston, Gorontalo pada Senin (21/09/2026).

Gorontalo - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Gorontalo menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) V dengan mengangkat tema “Bersatu, Berkolaborasi Membangun Ekosistem Bisnis Gorontalo yang Tangguh dan Inklusif” di Hotel Aston, Gorontalo pada Senin (21/09/2026).

Dalam Muprov tersebut, Andi Ilham terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Provinsi Gorontalo periode 2026-2031 usai memperoleh suara lebih unggul dari Fauzan Fadel Muhammad.

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan bahwa perbedaan pilihan dalam Muprov merupakan bagian dari dinamika organisasi. Namun, perbedaan tersebut diharapkan tidak meninggalkan persoalan yang justru dapat mengganggu jalannya organisasi setelah proses pemilihan berakhir.

Azis menilai, tujuan utama Kadin bukan semata-mata soal kepemimpinan organisasi, melainkan bagaimana organisasi tersebut dapat menjalankan fungsi kemitraan dengan pemerintah dan ikut menggerakkan perekonomian daerah.

Saya berharap dalam Muprov ini mengutamakan kebersamaan, karena Muprov ini intinya memilih ketua. Jadi siapapun yang terpilih harus merangkul seluruh pengurus dan anggota,” ujar Azis.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Gorontalo Terpilih periode 2026-2031 Andi Ilham mengajak seluruh pelaku usaha kembali bersatu. Ia mengatakan proses pemilihan telah selesai sehingga perbedaan dukungan selama Muprov tidak seharusnya berlanjut menjadi sekat di kalangan dunia usaha.

Lebih lanjut, Gubernur Provinsi Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan bahwa Kadin merupakan kelompok atau organisasi yang sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

“Ketika kami berjuang di Jakarta mencari peluang-peluang anggaran untuk Gorontalo, jalurnya adalah Kementerian. Tetapi ada satu jalur yaitu dunia usaha yang harus kami buka lebih lanjut dan di situlah peran Ketua Kadin (Provinsi) Gorontalo,” kata Gusnar.

Ia juga menyampaikan bahwa Kadin sebagai salah satu jembatan yang dapat membuka akses Gorontalo ke dunia usaha di tingkat nasional.

Menurut Gusnar, Kadin dapat membantu pemerintah mempromosikan berbagai potensi daerah kepada investor maupun pelaku usaha dari luar Gorontalo.

“Bagi saya Kadin menjadi jembatan bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo ke pusat, sekaligus mempromosikan potensi yang dimiliki Provinsi Gorontalo kepada swasta di luar Provinsi Gorontalo,” terangnya.

Hadir dalam acara tersebut WKU Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, WKU Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro dan WKU Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjourang.



Foto Bersama jajaran Pegurus Kadin Provinsi Gorontalo dalam acara Musyawarah Provinsi V Kadin Gorontalo dengan Tema “Bersatu, Berkolaborasi Membangun Ekosistem Bisnis Gorontalo yang Tangguh dan Inklusif” di Hotel Aston, Gorontalo pada Senin (21/09/2026).

Anindya Bakrie Lantik Pengurus Kadin Sulteng Periode 2026-2031, Ungkap Potensi Ekonomi Sulteng Tak Hanya Nikel



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan bakrie pada saat melantik jajaran pengurus Kadin Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) periode 2026-2031 yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Sulteng, Rabu (16/09/2026) malam.

Palu – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie melantik jajaran pengurus Kadin Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) periode 2026-2031 yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Sulteng, Rabu (16/09/2026) malam.

Anin sapaan akrabnya menyampaikan optimisme terhadap potensi ekonomi Sulteng. Menurut Anin, potensi daerah tidak hanya bertumpu pada nikel dan hilirisasi, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, seperti kelapa, durian, dan kakao.

“Manfaatkan jaringan nasional dan internasional untuk memperluas promosi investasi serta membuka akses pasar bagi pelaku usaha daerah,” ujar Anin.

Anin juga mengingatkan pengurus baru agar menjalankan amanah organisasi dengan menghadirkan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya UMKM, pencari kerja, dan generasi muda.

“Tiga kata untuk pengurus yang baru, yaitu harus bermanfaat, berdampak, dan amanah,” tegas Anin.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Sulteng Gufran Ahmad mengatakan, kepengurusan Kadin Provinsi Sulteng periode 2026-2031 dibangun sebagai rumah besar bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari pengusaha besar hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita ingin pengusaha lokal menjadi bagian dari pertumbuhan, bukan hanya menjadi penonton atau cadangan. Pengusaha lokal harus masuk ke dalam rantai pasok industri, memperoleh akses pasar, serta meningkatkan kapasitas dan daya saing,” kata Gufran.

Menurut Gufran, Kadin tidak boleh hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi dinamisator dunia usaha dengan menerjemahkan program pemerintah menjadi peluang bisnis yang nyata.

Keberhasilan organisasi, lanjutnya, akan diukur dari terbukanya peluang usaha, meningkatnya kapasitas pengusaha lokal, bertambahnya lapangan kerja, serta semakin banyaknya UMKM yang terlibat dalam rantai pasok industri.

"Namun kita juga menyadari bahwa akselerasi ekonomi Sulawesi Tengah tidak mungkin dilakukan oleh Kadin Sulawesi Tengah sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi dan dukungan yang kuat dari Kadin Indonesia serta pemerintah Sulawesi Tengah," tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur Sulteng Reny Arniwati Lamadjido menyatakan, Pemerintah Provinsi Sulteng siap memperkuat kolaborasi bersama Kadin dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Reny menyebut Sulteng memiliki potensi besar di berbagai sektor, tidak hanya pertambangan, tetapi juga pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Pemerintah daerah, lanjutnya, juga tengah menyiapkan sejumlah program pengembangan ekonomi, termasuk pencetakan 3.000 hektare sawah dengan pendekatan pertanian modern untuk mendukung Sulteng sebagai lumbung pangan.

"Kami welcome kalau ada investor yang mau masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah. Kami tidak mempersulit. Yang penting investor bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan," ujar Reny.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, dan Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Pipin Moh. Saeful Arifin.



Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo (dua dari kiri) yang juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI berfoto bersama jajaran Wantimpres di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Kadin Indonesia Konsolidasikan Pembentukan Kadin Papua Selatan Definitif



Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Keanggotaan sekaligus Ketua Caretaker Kadin Provinsi Papua Selatan Widiyanto Saputro (kiri) bersama Gubernur Papua Selatan, Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., IPM setelah melakukan konsolidasi organisasi sekaligus melaporkan kesiapan pembentukan Kadin Provinsi Papua Selatan di Kantor Gubernur Papua Selatan, Merauke, Papua Selatan, Senin (14/09/2026).

Merauke – Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus Ketua Caretaker Kadin Provinsi Papua Selatan Widiyanto Saputro melakukan konsolidasi organisasi sekaligus melaporkan kesiapan pembentukan Kadin Provinsi Papua Selatan kepada Gubernur Papua Selatan di Kantor Gubernur Papua Selatan, Merauke, Papua Selatan, Senin (14/09/2026).

Widiyanto mengatakan, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyambut baik proses pembentukan Kadin Provinsi Papua Selatan dan mendorong agar pembentukan Kadin Provinsi Papua Selatan definitif segera dilaksanakan.

“Gubernur juga mendorong keterlibatan seluruh komponen dunia usaha di Papua Selatan untuk bergabung dalam organisasi Kadin,” kata Widiyanto.

Selain itu, seluruh organisasi usaha di Papua Selatan diharapkan dapat diwadahi dan bergabung dalam Kadin Provinsi Papua Selatan, seperti Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (GAPEKNAS), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (IKINDO).

Setelah pertemuan tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan konsolidasi organisasi di seluruh wilayah Papua Selatan yang mencakup empat kabupaten, yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi.

Widiyanto menambahkan, konsolidasi tersebut mendapat dukungan dari empat kabupaten di Papua Selatan. “Sebagai langkah konkret, panitia deklarasi pembentukan Kadin Provinsi Papua Selatan akan segera dibentuk dan dipimpin oleh Yeremia Mahuze,” ujar Widiyanto.

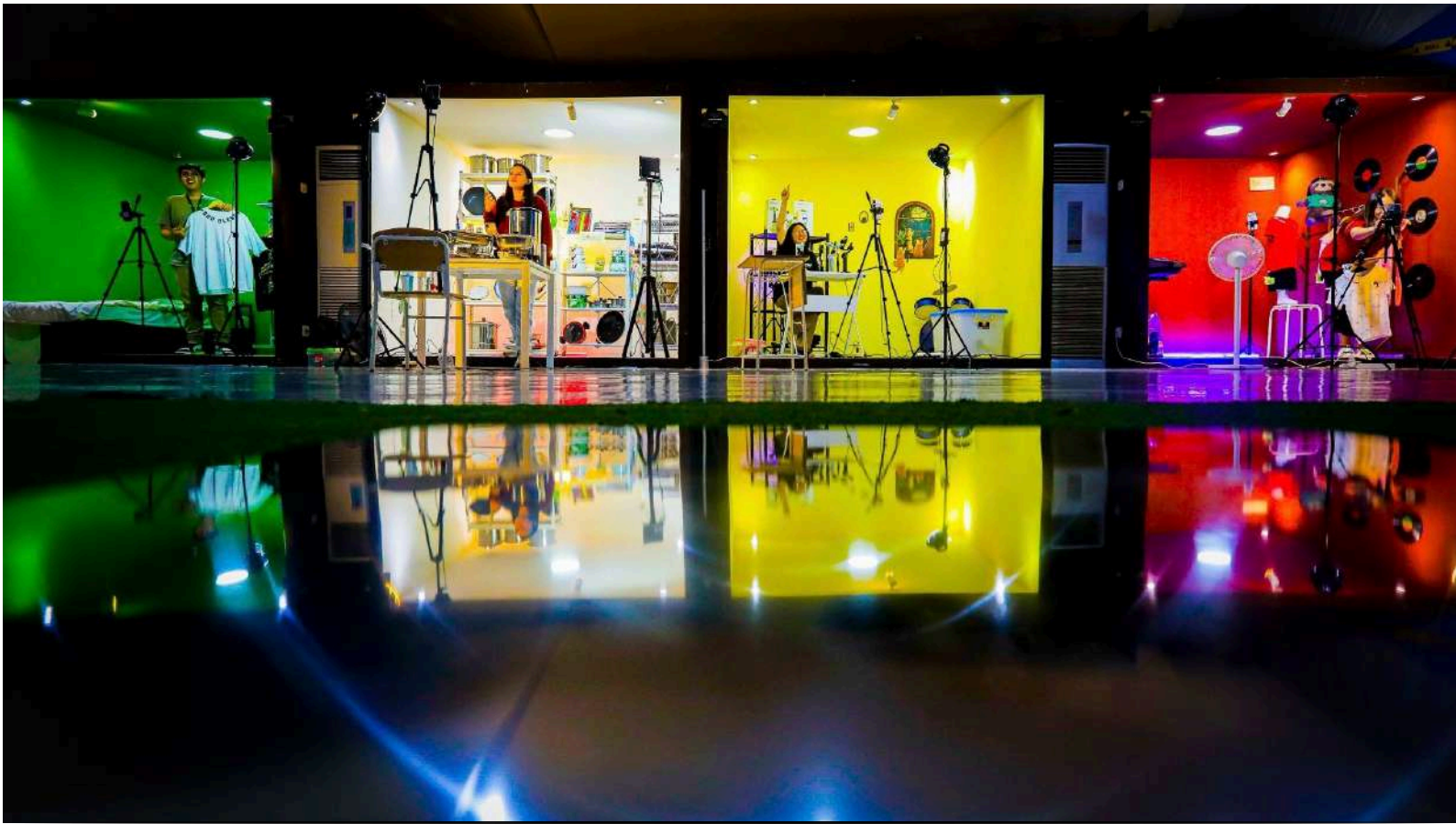
Deklarasi Kadin Provinsi Papua Selatan direncanakan berlangsung bulan ini, sedangkan pelantikan pengurus direncanakan pada Oktober-November 2026.

Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu dari empat provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua yang dibentuk pada 2022, bersama Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Provinsi Papua Selatan adalah provinsi ke-36 dari 38 provinsi di Indonesia, serta dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. UU tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 25 Juli 2022.

Pemenang Lomba **Fotografi** **UMKM**



JUARA 1



Adhi Wicaksono

DEPOK, JAWA BARAT
FOTOGRAFER CNN INDONESIA

“Semangat Berjualan Online Menuju Indonesia Digital”

Pemanfaatan teknologi digital dengan berjualan melalui siaran langsung (live selling) di platform digital. Strategi tersebut menjadi cara pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, berinteraksi langsung dengan konsumen, sekaligus meningkatkan peluang penjualan dan keuntungan.

Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu langkah mendorong UMKM naik kelas dan semakin mapan, sejalan dengan upaya Kadin Indonesia dalam memperkuat digitalisasi serta daya saing UMKM di tengah perkembangan ekonomi digital.

JUARA 2



Ganjar Mustika

BANDUNG, JAWA BARAT
PETERNAK AYAM SERAMA

“Warisan yang Terus Ditempa”

Di balik alunan gamelan yang terdengar sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia, ada tangan-tangan pengrajin yang terus bekerja menjaga keberlangsungannya. Di tempat sederhana ini, setiap bilah dan gong dibuat melalui proses panjang yang membutuhkan ketekunan, keterampilan, dan pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Gamelan bukan hanya sebuah produk seni dan budaya, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi keluarga pengrajinnya. Keahlian yang dipertahankan selama bertahun-tahun membuat usaha ini tetap hidup sekaligus membuka ruang bagi generasi berikutnya untuk melanjutkan pekerjaan dan tradisi.

Bagi sang fotografer, inilah wajah MAPAN: ketika keterampilan, usaha, dan warisan budaya dapat berjalan bersama. Sebuah UMKM tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga mempertahankan identitas, menciptakan penghidupan, dan menjaga agar warisan Indonesia tetap memiliki masa depan.

JUARA 3



Ghalib

SEMARANG, JAWA TENGAH

FOTOGRAFER RAKYAT MERDEKA ONLINE (RMOL) JATENG

“Membatik dengan Kaki”

Keterbatasan fisik tak menghalangi Trimah, seorang perempuan difabel asal Perumahan Minomartani, Kabupaten Sleman, untuk terus berkarya. Terlahir tanpa lengan dan tangan utuh, Trimah sukses menjadi pengrajin batik tulis mandiri dengan memanfaatkan kedua kakinya melalui merek karya “Batik Samparan Sae Trimah”. Nama samparan diambil dari bahasa Jawa yang berarti kaki, merujuk pada teknik pembuatan batik yang seluruh prosesnya, mulai dari menciduk malam panas, menggoreskan canting, hingga pewarnaan dilakukan sepenuhnya menggunakan kaki.

Uniknya, Trimah tidak mengandalkan pola sketsa atau pakem batik konvensional. Sejak mulai memproduksi batiknya sendiri pada tahun 2014, ia mengandalkan intuisi dan naluri seni untuk merangkai motif berupa garis, titik, serta lengkungan langsung di atas kain putih. Ketekunan istri dari atlet tolak peluru difabel Ari Setyawan ini membuahkan hasil manis. Karya “Batik Samparan Sae Trimah” tidak hanya diminati di dalam negeri, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional hingga ke Jepang dan Jerman.

JUARA 4



Prima Dwi Nanda

KLATEN, JAWA TENGAH
GURU DAN FOTOGRAFER

“Pembuatan Mie Lethek, Makanan Tradisional Khas Bantul”

Keberadaan industri rumahan mie lethe, makanan khas dari Srandakan, Bantul, Yogyakarta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Usaha ini mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus menjaga warisan kuliner tradisional agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Permintaan pasar yang terus ada menjadi bukti bahwa mie lethe masih memiliki daya tarik tersendiri.

Proses pembuatan mie lethe dilakukan secara manual menggunakan alat tradisional berbahan kayu, tenaga manusia dan bantuan tenaga sapi. Mulai dari penggilingan bahan baku, pengadonan, hingga pencetakan mie dilakukan tanpa mesin modern sehingga menghasilkan kualitas dan rasa yang tetap otentik.

Kuliner tradisional ini menjadi ikon Bantul yang tidak hanya digemari masyarakat lokal, tetapi juga menarik minat wisatawan yang berkunjung.

JUARA 5



Erianto

JAYAPURA, PAPUA.
FOTOGRAFER CENDERAWASIH POS

“Noken Papua”

Noken merupakan tas anyaman atau simpul multifungsi tradisional khas Papua yang terbuat dari serat alami (kulit kayu, anggrek hutan, dll.) yang berfungsi sebagai tas belanja, tempat menggantung anak/barang, simbol budaya, identitas sosial, dan bahkan digunakan dalam sistem pemilihan adat, serta telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia sejak 2012.

Mama-mama Papua menganyam kulit kayu menjadi Noken dan menjualnya sendiri. Banyak Mama-mama Papua yang menggantungkan ekonomi dari penjualan Noken.

Noken paling banyak ditemukan di Tanah Papua. Hampir semua masyarakat menggunakan Noken. Bahkan Noken menjadi oleh-oleh dari Bumi Cenderawasih.

Finalis Lomba Foto UMKM



Fajar hengki wijaya
Sidoarjo, Jawa Timur



Jiyanto
Grobogan, Jawa Tengah



Heru Putranto
Surabaya, Jawa Timur



Sofyan Efendi
Depok, Jawa Barat



Joni Manurung
Bandung, Jawa Barat

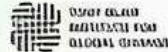
HOSTED BY



EVENT STRATEGIC PARTNERS



McKinsey
& Company



OPENING REMARKS

6 October 2026

Hotel Indonesia Kempinski Jakarta

**Anindya
Novyan
Bakrie**

Chairman,
Indonesian Chamber
of Commerce
and Industry
(KADIN Indonesia)



**Rosan
Roeslani**

Minister of Investment
and Downstream
Industry of Indonesia
/ CEO Danantara



CLOSING REMARKS

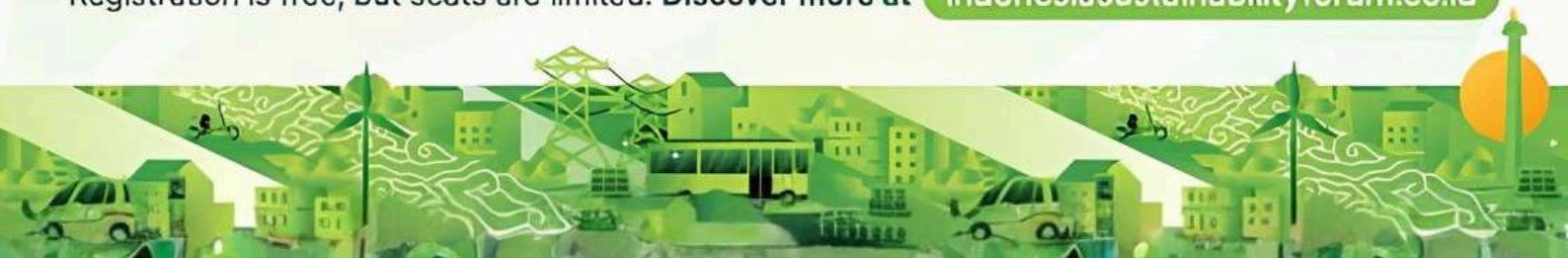
7 October 2026

Hotel Indonesia Kempinski Jakarta

**Luhut Binsar
Pandjaitan**

Chairman of the National
Economic Council of Indonesia

Registration is free, but seats are limited. Discover more at indonesiasustainabilityforum.co.id



HOSTED BY



EVENT KNOWLEDGE PARTNERS



INDONESIA
INTERNATIONAL
SUSTAINABILITY
FORUM

THEMATIC SESSION

6 October 2026, 13:10 – 14:25

Ballroom B, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta

Accelerating Multi-Use Forestry through Partnerships, Markets, and Landscape Collaboration

Organizer:



Sponsors



Laksmi Wijayanti

Director-General for Sustainable Forest
Management, Ministry of Forestry



Shinta W. Kamdani

Chairman, Asosiasi Pengusaha
Indonesia / APINDO



Nizhar Marizi

Deputy for Entrepreneurship, Ministry of
Micro, Small and Medium Enterprises of the
Republic of Indonesia



Imam Suharto

PT OLAM
INDONESIA



Soewarso

Chairman, Asosiasi Pengusaha
Hutan Indonesia (APHI)



Adi Junedi

Director Komunitas Konservasi
Indonesia (KKI) Warsi

Registration is free, but seats are limited.



6 October 2026



Hotel Indonesia Kempinski Jakarta

Discover more at

indonesiasustainabilityforum.co.id





APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)

Bisa ke Luar Negeri Tanpa Visa!

ABTC adalah kartu perjalanan pebisnis yang berlaku di negara-negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC sebanyak 19 negara anggota, kecuali Amerika Serikat dan Kanada.



APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC) berlaku di 19 negara:



Australia



Jepang



Rusia



Brunei
Darussalam



Korea Selatan



Selandia Baru



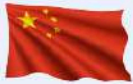
Cile



Malaysia



Singapura



China



Meksiko



Tailan



Filipina



Papua Nugini



Taiwan



Hong Kong



Peru



Vietnam



Indonesia



Keuntungan Memiliki ABTC:



Bebas visa untuk negara-negara APEC, kecuali Amerika Serikat dan Kanada



Bisa menetap 90 hari per kunjungan



Jalur ekspres VIP di imigrasi bandara



Persyaratan Permohonan Surat Rekomendasi APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)

- 1 Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Eksekutif Kadin Indonesia, dilengkapi dengan kop surat perusahaan, data pemohon, tanda tangan pimpinan & stempel Perusahaan
- 2 Scan paspor pemohon masa berlaku min. 2 tahun
- 3 Scan KTA Kadin aktif 2026 (nama dalam KTAB harus sama dengan yang mengajukan)
- 4 Scan NIB perusahaan
- 5 Scan ABTC terakhir (untuk perpanjangan ABTC)/optional



sekretariat@kadinindonesia.id
cc: selly.kadin@gmail.com



<https://trade.layanankadin.id/abtc>

Layanan Dokumen Ekspor

Kadin Indonesia membuka layanan dokumen ekspor, seperti Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO), Certificate of Export Goods, Certificate of Free Sale, serta legalisir dokumen ekspor dengan mudah dan cepat.

COO merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor.

Jenis SKA/COO

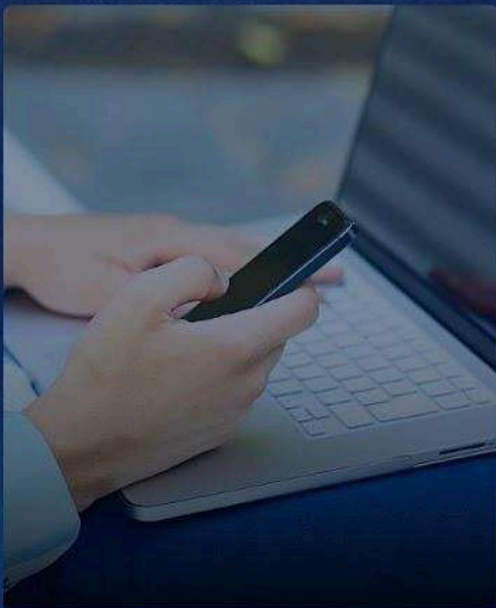
SKA Preferensi

Jenis SKA/COO sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara/kelompok negara tujuan.

SKA Non Preferensi

Adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu.

Tahapan Membuat Dokumen Ekspor:



- 1 Buka <https://trade.layanankadin.id/>
- 2 Log in atau Mendaftar Akun
- 3 Melengkapi Data-data perusahaan
- 4 Melakukan Pembayaran
- 5 Dokumen siap dicetak dan digunakan



KADIN INDONESIA

Jenis Formulir COO

Form China	Form untuk barang yang termasuk dalam Perjanjian Perdagangan Bebas CHINA-ASEAN yang menggunakan Common Effective Preferential Tariff Scheme yang diekspor ke CHINA - dibutuhkan CoO Kemendag.
Form B	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang tersebut diproduksi di Indonesia.
Form B with Notification	Form untuk barang yang diproduksi di Indonesia dengan pemberitahuan.
Form ASEAN-India	Form yang membutuhkan sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan barang diproduksi di Indonesia dan memenuhi persyaratan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-INDIA - wajib melampirkan SKA Kemendag.
Form A	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang diproduksi di Indonesia, dan memenuhi persyaratan Generalized System of Preferences.
Form D	Form untuk barang yang diproduksi di Indonesia dan memenuhi persyaratan ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme - wajib melampirkan SKA Kemendag.
Form Textile Product	Form untuk produk tekstil dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan barang diproduksi di Indonesia
Form Certificate of Export Goods	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang tersebut diproduksi di banyak negara.
Form Certificate of Free Sale	Form untuk bahan makanan yang diproduksi di Indonesia dan tersedia secara bebas untuk dijual di Indonesia dan pasar luar negeri.

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950



GUNAKAN ATA CARNET UNTUK KEPERLUAN EKSPOR SEMENTARA

APA ITU ATA CARNET?

ATA Carnet adalah sistem dan dokumen untuk kegiatan impor/ekspor sementara yang dapat dipergunakan dalam cakupan wilayah 81 negara.

Carnet merupakan dokumen pabean internasional yang diterima sebagai pemberitahuan pabean dan mencakup jaminan yang berlaku secara internasional.

Secara sederhana, ATA Carnet diistilahkan sebagai **“Paspor untuk Barang”**. Penerapan ATA Carnet dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat prosedur impor dan ekspor sementara sebagai upaya memfasilitasi dunia bisnis internasional.

PENGGUNA ATA CARNET

Pebisnis

Teknisi

**Penyelenggara
Pameran**

**Profesional,
perorangan/tim**

Kru Film

**Dokter/
Ahli Bedah**

Arsitek

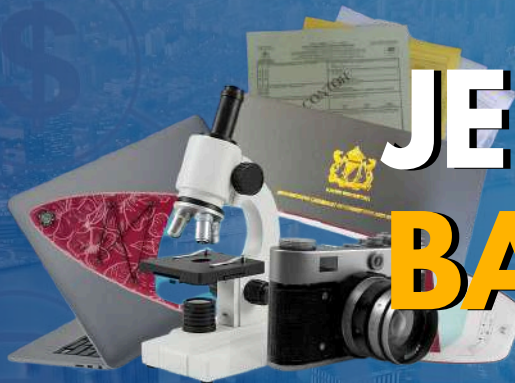
Seniman

Engineer

Peneliti

Tim Olahraga

Grup Musik



JENIS-JENIS BARANG

Penerapan **ATA Carnet** dilakukan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Izin Masuk/Penerimaan Sementara (Convention On Temporary Admission), Istanbul 1990. Barang-barang yang diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan menggunakan ATA Carnet diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 228 tahun 2014 mengenai Impor Sementara, yaitu barang-barang untuk tujuan sebagai berikut:

1

Untuk keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan atau kegiatan sejenis

2

Untuk peralatan profesional atau tenaga ahli

3

Untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan

4

Untuk keperluan pribadi wisatawan dan/atau barang yang diimpor untuk tujuan olahraga

5

Untuk tujuan kemanusiaan

Sementara itu, penggunaan ATA Carnet di negara tujuan selain Indonesia disesuaikan dengan aturan masing-masing negara tersebut mengenai penetapan tujuan barang yang menggunakan ATA Carnet.



PERSYARATAN PENERBITAN ATA CARNET

Salinan (*copy*) identitas diri Pemegang Carnet atau yang mewakili

Surat Kuasa Pemegang Carnet kepada yang mewakili

Salinan (*copy*) Kartu Tanda Keanggotaan Kadin

Salinan (*copy*) NPWP Perusahaan/Perorangan

Salinan (*copy*) SIUP, TDP, dan Domisili Perusahaan

Dokumen Deskripsi Barang, Foto Berwarna, Keterangan dimensi barang, negara pembuat barang dan harga barang

Rencana Perjalanan Barang

Surat Undangan penyelenggaraan dari negara asal

Menandatangani surat pernyataan bermaterai

Meletakkan Jaminan



NEGARA-NEGARA YANG MENERBITKAN DAN MENERIMA **ATA CARNET UNTUK KEPERLUAN EKSPOR DAN IMPOR SEMENTARA:**

- | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Afrika Selatan | 28. Inggris | 55. Pakistan |
| 2. Amerika Serikat | 29. Iran | 56. Pantai Gading |
| 3. Albania | 30. Irlandia | 57. Prancis |
| 4. Algeria | 31. Islandia | 58. Peru |
| 5. Andora | 32. Israel | 59. Polandia |
| 6. Arab Saudi | 33. Italia | 60. Portugal |
| 7. Australia | 34. Jepang | 61. Qatar |
| 8. Austria | 35. Jerman | 62. Republik Ceko |
| 9. Bahrain | 36. Kanada | 63. Rumania |
| 10. Belanda | 37. Kazakstan | 64. Rusia |
| 11. Belarus | 38. Korea Selatan | 65. Selandia Baru |
| 12. Belgia | 39. Latvia | 66. Senegal |
| 13. Bosnia Herzegovina | 40. Libanon | 67. Serbia |
| 14. Bulgaria | 41. Lithuania | 68. Singapura |
| 15. Chili | 42. Luksemburg | 69. Slowakia |
| 16. China | 43. Makau | 70. Slowenia |
| 17. Kroasia | 44. Madagaskar | 71. Spanyol |
| 18. Siprus | 45. Malaysia | 72. Sri Lanka |
| 19. Denmark | 46. Malta | 73. Swedia |
| 20. Estonia | 47. Maroko | 74. Swis |
| 21. Finlandia | 48. Mauritius | 75. Tailan |
| 22. Filipina | 49. Makedonia Utara | 76. Tunisia |
| 23. Gibraltar | 50. Meksiko | 77. Turki |
| 24. Hong Kong | 51. Moldova | 78. Ukraina |
| 25. Hungaria | 52. Mongolia | 79. Uni Emirat Arab |
| 26. India | 53. Montenegro | 80. Vietnam |
| 27. Indonesia | 54. Norwegia | 81. Yunani |

Dokumen **Ata Carnet** dikeluarkan oleh: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

Kontak:

Menara Kadin Indonesia Lantai 24, 29
Jl. HR Rasuna Said X-5 Kav.2-3
Kuningan, Jakarta



Telp. (021) 5274484



atacarnet.idn@kadin.id

atau

atacarnetindonesia@gmail.com

Cantumkan subject email:

- **Pengajuan ATA Carnet** (jika akan mengajukan ATA Carnet)
- **Info ATA Carnet** (jika ingin mendapatkan informasi mengenai ATA Carnet)





Cara Mendaftar Menjadi Anggota Kadin

Akses Situs Resmi

<https://kadin.id/keanggotaan>



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesla



kadinIndonesiaofficial



kadinIndonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id

Tata Cara Daftar Menjadi Anggota Kadin

1

Daftar Akun

Buka anggota.kadinindonesia.id

2

Verifikasi Akun

Klik link verifikasi yang dikirimkan ke email anda

3

Isi Data Perusahaan/ Asosiasi

Lengkapi informasi perusahaan atau asosiasi anda

4

Verifikasi oleh Admin

Admin Kadin akan memverifikasi data anda

5

Pembayaran

Lakukan pembayaran melalui sistem anggota Kadin

6

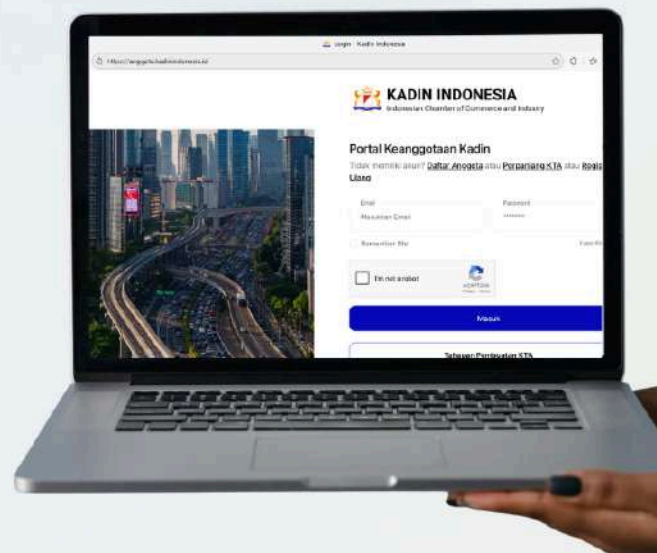
Validasi Pembayaran

Bagian Keuangan Sekretariat Kadin Indonesia akan memvalidasi pembayaran anda

7

Menjadi Anggota Resmi

Setelah divalidasi, anda resmi menjadi anggota! KTA dan invoice dikirimkan ke email anda



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinIndonesiaofficial



kadinIndonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id

KTA & SBU

Mengapa harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kompetensi, maupun SBU Non-Konstruksi dari Kadin Indonesia?



KTA dan SBU Kadin dapat **meningkatkan kepercayaan** terhadap perusahaan anda

Memiliki KTA menunjukkan bahwa **bisnis anda diakui dan terhubung dengan jaringan bisnis yang kuat**

Kepemilikan KTA Kadin dan SBU dari Kadin **memenuhi kelengkapan prasyarat mengikuti tender pengadaan barang dan jasa**

KTA dan SBU dari Kadin adalah **dokumen penting bagi perusahaan pemasok barang dan jasa untuk pemerintah atau swasta**

KTA dan SBU dari Kadin **menunjukkan standar kualitas, integritas dan kompetensi** yang diperlukan perusahaan untuk melayani pemerintah atau klien swasta



Manfaat Keanggotaan Kadin

Tumbuhkan bisnis melalui network dan kolaborasi

Akses terhadap pasar

Dukungan advokasi

Akses terhadap transformasi digital

Scaling up skill/kemampuan wirausaha dan pekerja

Dukungan dalam penerapan TKDN

Kemudahan pembuatan surat keterangan untuk bisnis

Pendampingan menuju Net Zero

Kesempatan promosi

Update terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis

Terlibat dalam penyusunan kebijakan industrial

Potongan harga produk/jasa



Saatnya **Level Up** dan **Maksimalkan Potensi Bisnismu**



Daftar segera menjadi anggota Kadin



anggota@kadinindonesia.id



(+62) 85695410875



kadin.id/keanggotaan

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24 dan 29
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950



Kadin.Indonesia.Official



kadin_Indonesia



kadinIndonesiaofficial



kadinIndonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id



Direktur Eksekutif Kadin Indonesia: Pipin Moh. Saeful Arifin

Penerbit: Kadin Communication Office | **Penanggung Jawab:** Kepala Kantor Komunikasi Kadin Indonesia, Primus Dorimulu | **Redaktur Pelaksana:** Taufik Zulkarnaen

Redaksi: Arita Gloria, Ari Kristiana K, Bagus Dharmawan, Nurdin, Sabrina Hutajulu, Hariwicahyo Utomo, Fery Hasibuan, Luthfiah Ramadhani S

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp. 021- 527503 | humas@kadin.id



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id